

Relasi Pertambangan,  
Kekejaman  
Neoliberalisme,  
dan Ilusi  
Pertumbuhan  
Ekonomi

# Bab 09



Sejak bergulirnya otonomi daerah pasca Reformasi 1998, desa-desa terpencil di kabupaten di Flores, Sumba, Timor, dan tentu juga daerah-daerah lain di Indonesia, dikejutkan oleh serbuan sejumlah besar perusahaan transnasional (selanjutnya PETRANS). PETRANS ingin menggali emas, biji besi atau mangan di desa-desa dengan menghancurkan sawah, ladang, kebun kopi, coklat atau cengkeh, pohon jati dan mahoni milik para petani miskin, merusak kantong-kantong hutan lindung yang masih sisa dan mengeringkan mata air mereka, dengan kompensasi yang tidak berarti atau kadangkala tanpa kompensasi sama sekali. Polusi air, tanah dan udara tak terhindarkan dan masyarakat menderita kehilangan lahan pertanian secara permanen, yang juga berarti kehilangan harapan hidup bagi generasi berikut.<sup>1</sup>

Berhadapan dengan tragedi ketidakadilan ini, masyarakat di desa-desa di Indonesia selama ini resah. Dalam kebingungan, mereka mengajukan banyak pertanyaan. Mengapa sampai tiba-tiba terjadi seperti ini? PETRANS ini apa? Mereka milik siapa dan dari mana sumber modal mereka yang sangat besar

---

<sup>1</sup> Untuk informasi yang agak lengkap tentang masalah pertambangan di Flores dan sekitarnya bisa lihat Alex Jebadu, dkk (eds.), *Pertambangan di Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk?* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2009).

untuk usaha pertambangan? Mengapa pemerintah daerah Indonesia tega mengkhianati rakyatnya sendiri dan memilih untuk “merangkul” PETRANS yang jelas-jelas menghancurkan kebun, sawah, ladang, mata air dan hutan lindung yang menjadi sumber kehidupan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dikaji dalam tulisan ini dengan mengeksplorasi hubungan antara pertambangan yang semakin menjamur oleh PETRANS di desa-desa di Flores dan di Indonesia pada umumnya<sup>2</sup> di satu pihak dan rezim ekonomi neoliberal di pihak lain. Tulisan diakhiri dengan kritik terhadap ideologi pertumbuhan ekonomi neoliberal sebagai sebuah ilusi dan resep pembangunan ekonomi Indonesia yang berdaulat.

Dengan mendasarkan diri pada kajian para ahli ekonomi dunia yang masih mempunyai hati nurani saat ini, diskursus ini akan berargumentasi bahwa PETRANS yang menggali tambang dengan merusak sawah dan ladang para petani di desa-desa di Indonesia (dan tentu juga di negara-negara berkembang lainnya di Afrika dan Amerika Latin) merupakan sebuah bentuk penjajahan baru oleh negara-negara industri maju dengan instrumen utamanya Lembaga Keuangan Internasional – Bank Dunia, IMF dan WTO – yang dimotori oleh sistem ekonomi neoliberal dengan menerapkan prinsip perdagangan bebas (*free trade*) dan pasar bebas (*free market*) dan dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan transnasional (PETRANS) milik mereka sebagai agen-agenya. Dalam definisi yang sangat minimal, PETRANS tidak lain dari calo-calo (*brokers*) rezim ekonomi neoliberal yang diusung negara-negara kaya industri untuk menguras kekayaan alam negara-negara miskin. Ini sebuah bentuk penjajahan baru yang sangat halus tapi kejam untuk mengeruk kekayaan alam milik orang miskin di negara-negara miskin. Tapi untuk menghantar point ini, berturut-turut akan dipresentasikan terlebih dahulu sekilas industri pertambangan yang bermasalah di Flores sekadar sebagai sebuah contoh konkret, industri pertambangan Indonesia dalam bingkai perundang-undangan dan politik di Indonesia serta gambaran umum tentang hakikat PETRANS.

<sup>2</sup> Tapi sesungguhnya masalah penyerbuan perusahaan transnasional (PETRANS) tidak hanya terjadi di daerah-daerah di Indonesia tapi juga hampir di seluruh negara miskin di seluruh Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Dalam dunia geopolitik-ekonomi, negara-negara yang sedang berkembang umumnya secara kebetulan terletak di belahan bumi bagian Selatan dengan ciri utama: masih miskin, belum mencapai kemajuan yang signifikan secara teknologis, pernah dijajah dan diperbudak selama 500 tahun (1500 sd 1945), tapi mereka mempunyai sumber daya alam yang masih kaya. Sedangkan negara-negara yang kaya dan maju secara teknologis serta pernah menjadi penguasa kolonial umumnya terletak di belahan bumi Utara. Dari sini lahir istilah Kelompok Negara Utara (*Countries of the North*) dan Kelompok Negara Selatan (*Countries of the South*). PETRANS yang sedang berkeliaran untuk menggali kekayaan alam di desa-desa negara miskin di belahan bumi Selatan umumnya milik negara industri di belahan bumi Utara. Bdk. John Madeley, *Big Business Poor Peoples: How Transnational Corporations Damage the World's Poor* (London: Zed Books, 2008) atau David C. Korten, *When Corporations Rule the World* (San Francisco: Berrett-Kohler Publishers, 1996) atau Julio de Santa Ana, “How the Rich Nations Came to be Rich” in Leonardo Boff and Virgil Elizondo (eds), *Option for the Poor: Challenge to the Rich Countries* (Edinburgh: T. & T. Clark Ltd, 1986).

## A. PERTAMBANGAN DI FLORES DAN PELANGGARAN HAK EKOSOB

Seperti pulau-pulau lain dalam Bumi Pertiwi Indonesia, pulau kecil Flores juga ternyata mengandung banyak bahan mineral di dalam rahimnya seperti emas, mangan, batubara, marmar, tembaga atau biji besi, dan 10 tahun terakhir telah menarik PETRANS untuk menambangnya juga. Jika dihitung dengan PT Aneka Tambang yang mulai beroperasi di Lingko Lolok, Desa Satar Punda dari Kecamatan Lambaleda dan di Torong Besi dan Desa Kajong dari Kecamatan Reok pada tahun 1979/1980, maka sejarah pertambangan di Flores telah berjalan sekitar 30 tahun. Tapi kebanyakan masyarakat Flores baru menyadarinya beberapa tahun belakangan ini setelah dampak negatif dan pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya (EKOSOB) masyarakat mulai dipersoalkan secara terbuka.

Setelah diinvestigasi oleh beberapa LSM seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JATAM (Advokasi Pertambangan) serta Komisi JPIC (Justice, Peace and Integrity of Creation) dari Gereja Katolik Flores, industri pertambangan di Flores ternyata penuh dengan masalah mulai dari pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat hingga pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang negara. Masyarakat desa bingung. Pembangunan, yang menurut Konstitusi Negara Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, sejahtera dan beradab, dalam kenyataannya ditempuh dengan menghancurkan sumber-sumber kehidupan rakyat, dengan menipu dan membohongi mereka serta melanggar undang-undang. Berikut adalah beberapa contoh yang serius yang terjadi di daerah-daerah di Flores, Provinsi NTT (Tukan 2009: 286-292).

*Pertama*, sebagian besar kegiatan pertambangan terjadi dalam lahan pertanian dan perkebunan penduduk desa (kopi, pala, cengkeh, jambu mete, kakao, vanili, kelapa, pisang, dan segala macam buah-buahan lainnya) serta di hutan produktif yang sengaja ditanam oleh penduduk desa (kayu jati merah, kayu jati putih, cendana, dan mahoni) dan hutan lindung dan daerah pesisir pantai. Sektor pertanian menyumbang 50% dari ekonomi lokal. Sebab itu pertambangan dengan menghancurkan lahan pertanian akan mengancam ketahanan pangan mereka baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.

*Kedua*, proses para pengusaha pertambangan memasuki daerah yang potensial untuk pertambangan, yang hampir semuanya berada di dalam lahan pertanian masyarakat desa tidak melalui tata cara yang baik. Para pemilik lahan misalnya sering tidak diberitahu kapan para pejabat perusahaan tambang akan datang ke kebun mereka, dan apa dan bagaimana mereka akan melakukan bisnis pertambangan. Begitu mereka tiba di lahan masyarakat mereka biasanya langsung mengukur dan mematok kebun para petani tanpa meminta izin terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan terjadi konflik di masyarakat desa, baik antara sesama masyarakat petani desa sendiri, antara masyarakat petani

desa dan perusahaan pertambangan maupun antara masyarakat petani desa dan pemerintah daerah.

*Ketiga*, industri pertambangan di Flores penuh pelanggaran hak asasi manusia. Mereka mengambil tanah petani tanpa persetujuan mereka, sering hanya karena perusahaan telah terlebih dahulu mendapat IUP dari pemerintah daerah.<sup>3</sup> Perusahaan pertambangan juga melanggar hak-hak sosial, budaya dan ekonomi masyarakat petani dengan merusak tanah komunal mereka yang memiliki arti penting dalam sistem sosial masyarakat agraris. Perusahaan pertambangan menghancurkan kehidupan petani dengan merusak lahan pertanian dan mengeringkan sumber air minum bagi mereka.

*Keempat*, IUP diberikan oleh Pemda Flores umumnya tanpa melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Banyak perusahaan mulai beroperasi dengan mendasarkan diri pada apa yang disebut Rencana kegiatan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang pada dasarnya sangat tidak cukup. Kedua hal ini sering dilakukan hanya untuk menghindari proses AMDAL yang sebenarnya. Walaupun mereka melakukan studi AMDAL, sampel atau kasus tidak diambil dari lokasi potensial tambang tetapi diambil dari tempat lain atau perusahaan bisa mengarang-ngarang saja.

Akibatnya hampir seluruh izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemda Flores bermasalah karena lokasi dikonsesi sebuah IUP terletak di wilayah pemukiman penduduk. Seluruh warga masyarakat yang terdiri dari sejumlah desa dan kampung bisa berada di tengah lokasi yang disegel untuk kegiatan pertambangan. Maka cepat atau lambat, mereka harus diungsikan keluar dari wilayah pemukiman mereka. Tapi pertanyaan kita adalah: Apakah mereka dapat dipindahkan? Apakah mereka bersedia pindah dari kampung mereka? Ke mana mereka akan direlokasi? Di sebuah pulau kecil dan berpenduduk padat seperti Flores, apakah masih ada ruang kosong untuk

---

3 Dalam kenyataannya, tidak ada hukum di Indonesia yang memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk menjual tanah milik pribadi masyarakat kepada pihak manapun termasuk kepada PETRANS. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Indonesia merupakan kejahatan serius melawan kemanusiaan, melawan demokrasi dan melawan Pancasila. UUD 1945 Pasal 33, ayat 3 menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat." Tapi bagian dari kalimat yang sering diabaikan, padahal sama penting dengan pernyataan "dikuasai oleh negara" adalah "dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Menurut tafsiran atas hukum ini, kalimat "digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umum rakyat" sangat penting karena merupakan jiwa dari hukum (*anima legis*) dari Pasal 33 ayat 3. Dalam hal ini negara tidak dapat menggunakan hak kuasanya jika penggunaan hak itu bertentangan dengan kemakmuran rakyat yang ingin dicapai. Dengan kata lain, hak kuasa negara *valid* dan sah hanya kalau penggunaan hak kekuasaan itu bisa membawa kemakmuran bagi rakyat. Sebaliknya, hak kekuasaan itu tidak sah dan tidak bisa digunakan kalau ia justru menyebabkan penderitaan rakyat. Selain itu, UUD1945 Pasal 33 ayat 3 juga tidak menyatakan bahwa jika kekayaan alam berada di bawah kebun pribadi warga negara, maka kebun mereka harus dihancurkan atau jika sumber daya alam ditemukan di bawah kampung atau kota, maka kampung atau kota tersebut juga harus dihancurkan.

relokasi mereka? Jawaban atas semua pertanyaan ini adalah jelas tidak. Luas sebuah IUP bisa meliputi wilayah seluas sekitar 18.000 hektar, yang berarti bahwa 5 hingga 10 desa beserta lahan pertanian masyarakat desa berada di dalam wilayah konsesi pertambangan (untuk dieksploitasi).

*Kelima*, Pemda di Flores, dalam hal ini dinas terkait, hampir tidak pernah melakukan sosialisasi industri pertambangan dengan segala dampak negatifnya yang sangat besar kepada masyarakat desa. IUP direncanakan diam-diam dan sembunyi-sembunyi di ruang “gelap”. Padahal salah satu dari 7 asas otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah asas transparansi (asas keterbukaan) seperti jelas tertulis dalam UU RI No. 22 Pasal 20 ayat 1 huruf d Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah. Oleh karena pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan kepentingan umum masyarakat, maka rencana proyek pembangunan apa saja mesti terbuka untuk seluruh masyarakat secara umum. Bahkan UU No. 4 Pasal 2 huruf c Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara juga menegaskan hal yang sama khusus untuk sektor pertambangan: “Pertambangan Mineral dan Batubara dikelola berasaskan transparansi”. Asas transparansi juga sudah lama ditegaskan dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2012. Dengan demikian, proses penerbitan IUP oleh Pemda Flores yang tidak transparan merupakan pelanggaran terhadap hukum negara oleh pemerintah daerah.

Selain kelima pelanggaran di atas, industri pertambangan di Flores juga penuh dengan pembohongan. Perusahaan mengatakan kepada masyarakat bahwa aktivitas mereka masih berada pada tahap eksplorasi, padahal sesungguhnya mereka sudah mulai eksploitasi. Pemda katakan bahwa pertambangan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi setelah APBD diperiksa hampir tidak ditemukan pemasukan yang berarti dari sektor pertambangan. Selain itu Pemda mengklaim bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi dampak pertambangan. Tapi kenyataannya, apa yang mereka lakukan adalah hanya propaganda aspek positifnya saja sambil membujuk masyarakat petani untuk menyerahkan lahan pertanian dengan kompensasi yang sangat rendah (Jebadu 2009: 159-169). Dan masih ada banyak kasus-kasus pelanggaran hal-hak masyarakat lainnya.

## **B. PERTAMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG DAN POLITIK INDONESIA**

Kekayaan alam Indonesia sesungguhnya sudah berulang kali dijarah banyak bangsa selama 500 tahun (1500–1945). Bagai sapi perah susu bumi pertiwi dilumat selama lima abad, bukan oleh anaknya sendiri tapi oleh pelbagai bangsa asing. Setelah melihat masa lalu yang pahit selamat 500 tahun, dari tahun 1945 sampai 1965, Soekarno berusaha keras menjaga kekayaan alam bumi pertiwi dengan melawan neokolonialisme dalam bentuk tatanan ekonomi dunia baru yang dipimpin dua Lembaga Keuangan Internasional –

IMF dan Bank Dunia. Soekarno bertekad membangun ekonomi Indonesia tanpa bergantung terlalu banyak pada bantuan asing (*foreign aid*) dan pinjaman luar negeri pada mantan penguasa kolonial. Soekarno tahu, *foreign aid* hanya sebuah taktik. Dengan sentimen ini, Soekarno menolak pinjaman yang ditawarkan IMF dan Bank Dunia dan menutup Indonesia terhadap agennya – PETRANS.<sup>4</sup> Namun usahanya ini berantakan.

Pemerintahan Soekarno digulingkan tahun 1965-1966 yang disinyalir merupakan sebuah konspirasi beberapa negara Barat selain karena sikapnya yang tidak tegas terhadap komunisme di Indonesia tapi juga dimotivasi kepentingan untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Menurut riset John Pilger, tak lama setelah Soekarno digulingkan, ekonomi Indonesia dirancang secara baru sektor demi sektor dalam sebuah sidang di New York yang dihadiri pelbagai PETRANS besar Eropa dan AS waktu itu.<sup>5</sup> Bumi Indonesia seperti dibagi-bagi di antara para bangsa. Pada tahun 1967, hanya setahun setelah Soekarno dijatuhkan, pemerintahan baru Indonesia memberikan izin kuasa pertambangan kepada PT Freeport milik Amerika Serikat untuk mengeksploitasi Papua Barat hingga hari ini (Gedicks 2005: 110).

Pada tahun yang sama (1967), pemerintah Indonesia, di bawah presiden baru Soeharto, secara resmi menyambut investasi asing dan perusahaan mereka untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dengan mengeluarkan UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No.5/1967 tentang Kehutanan dan UU No. 11/1967 tentang Pertambangan. Undang-undang perdana mengenai pertambangan ini telah membawa Indonesia untuk pertama kalinya ke tahap di mana pemerintah Indonesia menjual secara cepat dan murah hampir semua kekayaan alam Indonesia kepada perusahaan asing<sup>6</sup> yang sekarang ini dikenal dengan nama perusahaan transnasional atau PETRANS. Sejak tahun 1967, PETRANS telah berkeliaran di seluruh tanah Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya termasuk di sektor pertambangan.

Sejak masa pemerintahan Soekarno hingga hari ini, setiap pergolakan politik dan ekonomi di Indonesia selalu dimanfaatkan oleh PETRANS untuk mendorong lahirnya berbagai peraturan perundangan yang melegitimasi eksploitasi ekonomi mereka di Indonesia. Kepemerintahan Soeharto dimulai dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama atau *the Letter of Intent* (LoI) dengan IMF dan secara resmi memaksa Indonesia untuk menganut sistem ekonomi liberal. Pada tahap selanjutnya beragam perundangan dikeluarkan

4 Hal ini merupakan latar belakang mengapa Soekarno menggunakan slogan “Go to hell with your aids!” (Persetan dengan bantuanmu!) dalam pidato-pidatonya melawan neokolonialisme yang diperankan oleh negara-negara maju melalui IMF dan Bank Dunia.

5 Untuk informasi lebih lanjut, bisa lihat dan dengar John Pilger, “Konspirasi di Indonesia”, in <http://www.youtube.com/watch?v=X7Fbmy3V0hs> (diakses pada 28 Oktober 2011).

6 Khalid Muhamad, “Korporatokrasi dan Peraturan Eksploitasi Alam di Indonesia” (manuskrip yang tak terbit).

mulai dari liberalisasi fiskal dan moneter hingga pada dominasi penguasaan aset-aset alam.<sup>7</sup> Sebagai akibatnya, hampir sebagian besar kekayaan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke terutama kelima pulau besar sudah dieksploitasi dan menyebabkan dampak kehancuran alam yang besar. Bangka dan Belitung, bekas tambang timah di Sumatera misalnya, hampir tak layak dihuni lagi dewasa ini.<sup>8</sup> Hutan Kalimantan sisa 73.73% pada tahun 1985 dan hanya sisa 44.4% pada tahun 2010<sup>9</sup>. Di Papua Barat terjadi penghancuran lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat dan ribuan jiwa rakyat Papua Barat telah dibunuh dalam perjuangan mereka mempertahankan hak-hak atas tanah dan hak atas keberlangsungan hidup di tanah Papua Barat melawan pemerintah yang bersekongkol dengan PETRANS di sektor pertambangan (Gedicks 2005: 109-134). Kekayaan alam sudah hampir habis dieksploitasi, tapi Bangka, Belitung, Kalimantan, Papua Barat, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia belum juga berkembang menjadi kota-kota metropolis modern seperti London, Paris, Milan, Frankfurt atau Berlin di Eropa atau seperti kota Hong Kong, Tokyo atau Macao di Asia Timur. Sebaliknya, mereka menjadi lebih miskin daripada keadaan sebelum kekayaan alamnya dikeruk PETRANS.

Kalau kita melihat sejarah ini, maka pengerukan kekayaan alam Indonesia oleh PETRANS sebenarnya bukan merupakan suatu hal baru. Tapi apa yang baru, mengejutkan dan bahkan menakutkan banyak masyarakat desa di Indonesia saat ini adalah bahwa PETRANS dalam 10 tahun terakhir ini telah berusaha juga untuk mengeksploitasi kekayaan alam di pulau-pulau kecil namun bertanah subur dan berpenduduk padat dengan menghancurkan lahan-lahan pertanian masyarakat. Kemudahan perusahaan asing ini untuk masuk setiap desa di Indonesia, termasuk di NTT, berhubungan erat dengan reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998. Setelah Soeharto jatuh pada tahun tersebut, struktur politik Indonesia berubah dari sentralisasi ke desentralisasi. Dalam sistem pemerintahan yang baru, seperti yang diatur dalam UU No. 22/1999 yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 32/2004 dan UU No. 12/2008, Pemda Indonesia mempunyai otonomi yang luas untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan di setiap daerahnya sendiri.

Melalui Undang-Undang Otonomi ini, setiap Pemda di Indonesia mempunyai wewenang menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan (IUP). Perusahaan nasional dan asing atau PETRANS tidak perlu lagi susah-susah melamar untuk memperoleh IUP pada pemerintah pusat di Jakarta tapi bisa melamar langsung kepada seorang gubernur di setiap provinsi atau bupati di setiap daerah

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Bdk. Jukandi Dori, "Dampak Penambangan Timah bagi Masyarakat Bangka Belitung" in [http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DAMPAK%20PENAMBANGAN%20TIMAH%20BAGI%20MASYARAKAT%20BANGKA%20BELITUNG&nomorurut\\_artikel=363](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DAMPAK%20PENAMBANGAN%20TIMAH%20BAGI%20MASYARAKAT%20BANGKA%20BELITUNG&nomorurut_artikel=363) (diakses pada 4 Maret 2012).

<sup>9</sup> Rhett A. Butler, "Borneo", in <http://www.mongabay.com/borneo.html> (diakses pada 14 Maret 2012).

kabupaten. Sebagai bentuk pelaksanaan atas Undang-Undang ini, misalnya, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur di Flores telah mengeluarkan 50 IUP kepada 20 PETRANS dari tahun 2007 sampai 2009 (Tukan 2009). Pada tahun 2010 pemerintah NTT menerbitkan 240 IUP baru yang diberikan kepada pelbagai PETRANS untuk menggali tambang mangan di pulau kecil Flores, Sumba, dan Timor.<sup>10</sup> Dan menurut berita terakhir, hingga 3 Januari 2012 Pemerintah Provinsi NTT telah menerbitkan tidak kurang dari 413 IUP.<sup>11</sup>

Selain dampak negatif yang masif dari industri pertambangan terhadap lingkungan dan sumber-sumber kehidupan manusia, tampaknya masyarakat desa, pemerintah daerah di Flores atau di Indonesia pada umumnya mempunyai pengetahuan yang amat terbatas tentang PETRANS. Yakni pengetahuan tentang siapa mereka dan bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. Misalnya, apakah perusahaan Australia, Korea, Cina atau Amerika dan lain-lain yang berkeliaran di kampung-kampung miskin di pulau-pulau kecil Flores, Timor, Sumba dan pulau-pulau lain di Indonesia karena mereka tertarik menolong orang-orang miskin? Ataukah mereka datang karena didorong oleh motivasi ketamakan untuk mencari keuntungan atau laba (*profit*) untuk para pemegang saham perusahaan mereka?

### C. PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DAN TENDENSINYA YANG TAK TERPUJI

#### 1. Pertumbuhan jumlah PETRANS yang drastis

Kerjasama manusia dalam mengejar tujuan bersama di bidang ekonomi diperkirakan sudah setua sejarah peradaban manusia. Namun, perusahaan berkembang menjadi modern baru terjadi sejak abad pertengahan (500–1500 AD) hingga pada masa munculnya Revolusi Industri pada akhir abad ke-18 (Douglass 1979: 12). Mereka mulai berkembang dengan cepat setelah Tata Ekonomi Dunia Baru (*New International Economic Order*) didirikan di Konferensi Bretton Woods (USA) pada 1944, setahun sebelum Perang Dunia II berakhir. Konferensi ini untuk pertama kali mempromosikan ide perdagangan bebas dan pasar bebas kepada seluruh dunia yang kemudian mempercepat proses ekspansi modal internasional dan memberikan tempat subur bagi perkembangbiakan PETRANS sebagai alat dan sekaligus agen pelaksana dari Tata Ekonomi Dunia Baru yang dipimpin Dunia Barat (Ana 1986: 8-9).

Secara hukum perusahaan merupakan seorang pribadi artifisial yang dapat bertindak dan buat kontrak, dapat menuntut dan dituntut di depan hakim,

10 “Dinas Pertambangan NTT Terbitkan 240 IUP Mangan” (Mineral Department of NTT Province Issued 240 Licenses of Manganese,” in <http://www.censin.com/dinas-pertambangan-ntt-terbitkan-240-iup-mangan/> (diakses pada 28 Desember 2011).

11 “Evaluasi 413 Isin Pertambangan di NTT,” in <http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=44450> (diakses pada 4 Januari 2011).

dapat memiliki dan mengelola barang. Tapi, pemilik yang sebenarnya dari sebuah perusahaan adalah mereka yang menanam modal di perusahaan bersangkutan dan lazim disebut sebagai pemegang saham atau pemilik modal (*stockholders/shareholders/shareowners*) yang menikmati kewajiban terbatas. Secara hukum mereka tidak bertanggungjawab atas apa pun yang perusahaan lakukan dengan bisnis mereka di manapun mereka melakukan usaha di seluruh dunia (Douglass 1979). Kalau perusahaan melanggar undang-undang, pemegang saham yang menanam modal uang di dalam perusahaan tidak bisa dituntut secara hukum di depan pengadilan, melainkan hanya pegawai yang menjalankan perusahaan.<sup>12</sup>

Kalau operasi bisnis mereka dilakukan di beberapa negara sekaligus, maka perusahaan biasanya disebut *transnasional corporations* (TNCs – perusahaan yang wilayah bisnisnya melintasi batas-batas negara), *multinational corporations* (MNCs) atau *international corporations* (korporasi internasional) yang semuanya mempunyai arti sama. Dalam ekonomi global saat ini, PETRANS telah menjadi salah satu lembaga ekonomi yang berperanan sangat penting. Di seluruh dunia pertumbuhan jumlah mereka sangat pesat. Jumlahnya tumbuh dari hanya sekitar 7.000 PETRANS pada 1970 menjadi sekitar 39.000 PETRANS pada 1995 dengan 270.000 anak perusahaan cabang di pelbagai negara (Drimmelen 1998: 38). Menurut sebuah laporan, pada 2007 jumlah mereka sudah mencapai sekitar 78.000 buah PETRANS di seluruh dunia dengan 780.000 anak perusahaan di pelbagai negara (Madeley 2008: 2). Jumlah ini hampir dua kali lipat jumlah PETRANS pada 1995.

## 2. Kecenderungan tak terpuji dari PETRANS

Tak dapat disangkal bahwa PETRANS membawa banyak kontribusi bagi negara-negara di mana saja mereka melakukan bisnis. Mereka bisa membantu proses pengalihan teknologi, tenaga ahli, barang dan jasa.<sup>13</sup> Namun di pihak

12 Contoh, PT Lapindo masih gantung kerugian korban lumpur sebesar Rp 900 millar atau menurut laporan ICW hingga November 2010 PT Bumi Resources, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal diduga lalai membayar pajak kepada negara sebesar Rp 2,1 triliun pada tahun 2007. Keempat perusahaan ini disebut-sebut sebagai pemilik Aburizal Bakrie karena ia merupakan pemegang saham terbesar. Sebagai pemegang saham atau pemilik modal di dalam keempat perusahaan ini ia tidak duduk sebagai anggota staf pimpinan perusahaan. Menurut hukum, ada pemisahan yang tegas antara dia sebagai pemilik modal di satu pihak dan perusahaan yang menjalankan modalnya di pihak lain. Sekali lagi menurut hukum, Aburizal Bakrie tidak bisa dipersalahkan dan tidak bisa dituntut di depan pengadilan karena perusahaan yang menjalankan modalnya melakukan kesalahan dengan tidak membayar pajak kepada negara. Untuk informasi lebih lanjut lihat Zulfi Suhendar, "Lapindo Masih 'Gantung' Kerugian Korban Lumpur Rp 900 miliar" <http://indonesiacompanynews.wordpress.com/category/bakrie-empire/> (diakses pada 24 April 2012) dan "ICW Tagih Komitmen Presiden Soal Pajak Grup Bakrie" <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=10429> (diakses pada 24 April 2012).

13 William Duncan, "Transnational companies: Goodies or baddies?" <http://www.duncan-wil.co.uk/tnc.html> (diakses pada 28 November 2011).

lain, PETRANS juga telah banyak dicerca di mana-mana karena praktik-praktik dan kecenderungan mereka yang tidak terpuji dalam melakukan bisnisnya di seluruh dunia.

Pertama-tama, seperti halnya bisnis pada umumnya, PETRANS merupakan lembaga yang berorientasi untuk mencari laba atau keuntungan (*profit-oriented*). Mereka didirikan dengan satu tujuan tunggal, yakni berbisnis sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan atau laba bagi *shareholders* (pemegang saham) mereka. *Shareholders* adalah para pemodal atau bos-bos mereka. Dalam bukunya berjudul *Big Business Poor Peoples: How Transnational Corporations Damage the World's Poor* John Madeley mengatakan bahwa motivasi mencari laba inilah yang merupakan sebab utama mengapa jumlah PETRANS tumbuh hampir dua kali lipat antara 1995 dan 2007 (Madeley 2008). Modal besar yang digunakan oleh PETRANS untuk menjalankan bisnisnya berasal atau dipinjam dari para pemegang saham, baik sebagai individu, bank swasta maupun bank pemerintah dari sebuah negara.

PETRANS harus bekerja keras untuk mengembangkan modal yang dipercayakan ini melalui usaha bisnis sehingga pada waktunya mereka dapat mengembalikan modal dari para pemegang saham beserta dengan bunganya, laba atau dividen. Menurut teori ekonomi, mendapat keuntungan atau laba merupakan sesuatu yang wajar sampai pada batas tertentu. Tapi yang buruk dari hal ini adalah bahwa motivasi mengejar keuntungan sangat sering membuat PETRANS serakah, tidak jujur, dan curang dalam berurusan dengan pihak lain, termasuk dengan para pekerja, pemerintah atau masyarakat di mana saja mereka melakukan bisnis. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap orang miskin. Ketika mereka melakukan bisnis di wilayah orang miskin, maka hal itu mereka lakukan bukan karena dimotivasi oleh keinginan untuk meringankan penderitaan orang miskin. Sebaliknya, dengan seluruh kekuatan mereka justru akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan/laba melalui bisnis dengan orang miskin, termasuk bisnis yang bisa menghancurkan sumber kehidupan orang-orang miskin. Eksploitasi pertambangan yang dipaksakan di lahan-lahan pertanian masyarakat miskin di pelbagai tempat di seluruh dunia merupakan contohnya yang tepat.<sup>14</sup>

14 Tentang hal ini ada banyak cerita sedih tentang bagaimana PETRANS yang berbisnis di sektor pertambangan atau sektor lain telah secara sistematis dan tanpa rasa belaskasihan menghancurkan sumber-sumber hidup orang miskin di negara-negara miskin yang sedang berkembang. Di beberapa negara berkembang di Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin, polisi dan tentara telah sering disogok untuk melindungi dan menjaga perusahaan asing yang menghancurkan lahan-lahan rakyat yang seharusnya mereka lindungi dan membunuh masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan tanah mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat antara lain Mander Jerry and Tauli-Courpus Victoria (eds), *Paradigm Wars: Indigenous People's Resistance to Globalization* (San Francisco: Sierra Club Books, 2006), Madeley, John, *Big Business Poor Peoples: How Transnational Corporations Damage the World's Poor* (London: Zed Books, 2008), Moody Roger, *The Risk We Run: Mining, Communities and Political Risk Insurance* (London: International Books, 2005), Klare, Michael T., *Resource Wars: The Landscape of Global Conflict* (New York: Owl Books, 2001).

Kedua, 90% dari 78.000 buah PETRANS yang bergentayangan di bisnis global berasal dari negara-negara industri di belahan dunia bagian utara dan berkantor pusat di sana. Lebih dari setengahnya berasal dari lima negara: Perancis, Jerman, Belanda, Jepang, dan USA. Beberapa tahun terakhir, barisan ini diikuti oleh raksasa ekonomi baru Asia, yaitu Cina dan India. PETRANS sanggup memengaruhi kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah asal mereka. Kepentingan pemerintah dari sebuah negara industri di Eropa atau Cina atau Jepang di negara-negara miskin sering ditunggangi oleh kepentingan bisnis PETRANS yang dalam prosesnya berbaur dengan suap-menyuap (*bribery*).<sup>15</sup>

Menurut John Madeley, suap atau korupsi itu pada dasarnya jahat tapi merupakan praktik yang sudah biasa dilakukan PETRANS. PETRANS yang didukung oleh beberapa negara industri bahkan bisa menyogok untuk membatalkan agenda sidang PBB mengenai sejumlah sepak terjang bisnis PETRANS dalam Konferensi Rio de Janeiro pada tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan yang Berkelanjutan. Demi kepentingan bisnis, PETRANS juga sanggup menyuap WTO (*World Trade Organization*). Di Brussels, ada ribuan kantor cabang PETRANS yang siap memengaruhi setiap sidang Parlemen negara-negara Uni Eropa (Hallman 1994: 274).<sup>16</sup>

Ketiga, demi keuntungan atau laba usaha (*profit*) PETRANS akan menempuh segala macam cara termasuk dengan melanggar hukum dan hak-hak masyarakat, hak para tenaga buruh atau masyarakat adat. Ada banyak contoh dari praktik tak terpuji ini. Ada banyak PETRANS yang telah memilih beroperasi dan terus mengoperasikan bisnis mereka di negara miskin yang sedang berkembang untuk menghindari aturan dan undang-undang yang ketat di negara-negara asal mereka di belahan dunia utara. Selama ini negara-negara miskin merupakan tempat berlindung mereka yang aman di mana mereka bisa bermain curang dengan orang miskin yang sering tidak tahu apa-apa tentang dampak negatif dari bisnis mereka, dan pemerintah lokal dari negara berkembang yang sekian sering belum memiliki aturan ketat sehubungan dengan persoalan seperti perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan hidup masyarakat. PETRANS juga cenderung memilih untuk berbisnis di negara-negara berkembang yang pemerintahannya diktator dan korup, mudah disuap, mau berpihak pada bisnis mereka dan gampang menekan rakyatnya bila sesewaktu mereka bergolak. PETRANS sering menikmati keringanan membayar pajak yang diberikan oleh pemerintah negara di mana mereka berbisnis. Yang jelas, hal ini terjadi karena ada perhitungan di belakang layar.<sup>17</sup>

15 Ward Dan Sewell, "Transnational Corporations," <http://www.halexandria.org/dward318.htm> (diakses pada 4 November 2011); lihat juga Madeley John, *Ibid.*, 177-178.

16 Lihat juga Madeley, John, *Ibid.*, hal.173. Menurut Madeley, PETRANS sendiri melobi pemerintah negara asal mereka sehingga sidang tentang dampak negatif dari bisnis PETRANS dicoret dari agenda sidang PBB di Rio de Janeiro tahun 1992 yang bertepatan Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang Berkelanjutan.

17 Madeley John, *Ibid.*, hal. 14-25. Bahkan di negara asal perusahaan-perusahaan transnasional, masyarakat telah muak dengan pengaruh perusahaan terhadap kehidupan politik.

Keempat, demi laba PETRANS mampu mendominasi dunia politik, ekonomi dan keuangan di setiap negara di mana mereka beroperasi. Pelobi mereka dapat ikut merancang dan mempromosikan undang-undang yang akan mendukung kepentingan mereka. Oleh karena pengaruh PETRANS di belakang layar, pemerintah dan parlemen sebuah negara bisa mendukung bisnis perusahaan yang jelas-jelas merusak lingkungan dan hayat hidup orang banyak. Diyakini, pemerintah Amerika Serikat dan Kanada keluar dari Protokol Kyoto karena diancam oleh PETRANS yang berasal dari negara mereka. Piagam (*charter*) PETRANS dan kekuatan asuransi membuat mereka bebas dari tanggungjawab sosial. PETRANS umumnya tidak peduli dengan kerusakan lingkungan hidup. Secara hukum, pemilik modal perusahaan (*shareholders*) kebal terhadap hukum. Pemilik modal atau pemegang saham tidak bisa dituntut di hadapan hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan kecuali para pegawai yang menjalankan perusahaan. Tapi oleh asuransi dan kekuatan uang, petugas perusahaan juga dalam kenyataan hampir kebal dari tuntutan hukum terhadap pelanggaran mereka.<sup>18</sup>

Kelima, PETRANS juga cenderung menghindari setiap peradilan hukum dan protes publik karena setiap keputusan dari dan untuk sebuah perusahaan yang sedang beroperasi di sebuah negara lain dibuat di kantor pusat di negara

---

Banyak orang Amerika Serikat dewasa ini, misalnya, sudah tidak puas dengan pemerintah dan para politisi mereka yang pada dasarnya telah dibeli oleh PETRANS. Karena perusahaan-perusahaan ini merupakan institusi yang mendanai kampanye-kampanye para calon presiden, gubernur atau senator di Amerika Serikat. Memang tampaknya masyarakat yang memilih pada Pemilu, setelah terpilih para politisi umumnya cenderung hanya mendengar perusahaan dan membela kepentingan bisnis mereka. Oleh karena praktik ini, bisa dikatakan bahwa demokrasi di Amerika ini atau setiap demokrasi yang didanai oleh perusahaan, adalah demokrasi palsu. Menentang pencaplokan demokrasi Amerika oleh kekuasaan korporasi/perusahaan merupakan alasan utama mengapa para kaum muda Amerika Serikat demonstrasi menduduki Wall Street selama tiga bulan menjelang akhir tahun 2011.

18 Seperti telah dideskripsikan pada catatan kaki 12, pejabat perusahaan cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap tanggung jawab sosial atau dampak negatif terhadap lingkungan dari bisnis mereka karena menurut hukum perusahaan yang diakui oleh negara, pemilik yang sesungguhnya dari sebuah perusahaan adalah seorang atau beberapa pemegang saham atau pemilik modal (*shareholders, shareowners, stockholders* atau *stockowners*), yaitu seorang atau sekelompok orang yang menanamkan modalnya di sebuah perusahaan. Para pejabat atau pegawai perusahaan di sisi lain hanya merupakan kaki tangan mereka yang bertugas untuk menggandakan uang atau modal dari pemegang saham melalui bisnis perusahaan. Para pemegang saham sebagai pemilik sejati dari sebuah perusahaan tidak dapat bertanggung jawab terhadap apa pun yang terjadi di perusahaan, termasuk hal-hal tidak beres seperti korupsi dalam bentuk suap-suapan atau sogok (*bribery*) atau dampak negatif terhadap lingkungan, karena menurut hukum, ada pemisahan yang tegas antara pemegang saham dan perusahaan. Penambangan oleh sejumlah perusahaan pertambangan asing dari Australia, Amerika atau Jepang yang menambang dengan menghancurkan sawah petani dan hutan lindung di Flores, Sumbawa, Papua atau Kalimantan, misalnya, jelas melawan hukum. Untuk usaha penambangan, perusahaan-perusahaan ini mengantongi pinjaman modal dari bank swasta atau bank pemerintah di Jepang, Australia atau Bank Dunia. Tapi kalau kejahatan penambangan di sawah petani dan hutan lindung diperkarakan, maka pemerintah Jepang, Australia atau Bank Dunia sebagai pemegang saham tidak bisa ikut dituntut di pengadilan. Mereka dianggap tidak bersalah menurut hukum ekonomi perusahaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat North Douglas, *Ibid.*

asal perusahaan bersangkutan. Keputusan-keputusan dari PETRANS yang barangkali memiliki dampak negatif yang amat besar terhadap kehidupan orang miskin di negara miskin yang sedang berkembang di Afrika, Asia Selatan atau Amerika Latin dibuat di kota-kota nun jauh seperti Tokyo, Beijing, Washington, London, Toronto atau Paris. Lalu ketika mengimplementasikan keputusan bisnis itu di negara-negara berkembang, PETRANS biasanya tidak merasa berkewajiban untuk berkonsultasi dengan orang-orang miskin setempat tentang sepak terjang perusahaan mereka. Dan setelah “membeli” (menyuap) pemerintah lokal yang korup dari negara-negara berkembang, mereka siap untuk mengoperasikan bisnis mereka tanpa peduli terhadap protes masyarakat miskin setempat yang berjuang mempertahankan hak-hak mereka atas tanah, atas air dan lingkungan yang sehat, bersih dan aman (Madeley 2008).

Keenam, globalisasi adalah sebuah fakta terberi dan bukan sebuah kebijakan buatan manusia. Namun, ekonomi pasar bebas yang global saat ini merupakan sebuah realitas yang dengan sengaja diciptakan manusia. Pasar bebas global diciptakan pertama kali oleh bangsa Barat pada Konferensi Bretton Woods 1944. Dalam ekonomi pasar dan perdagangan bebas, PETRANS amat mendukung setiap kebijakan liberalisasi ekonomi seperti pembebasan hambatan impor dan ekspor untuk perdagangan dan mengurangi peran negara dalam mengatur ekonomi. Tetapi dalam praktiknya, PETRANS akan mempromosikan liberalisasi ekonomi hanya sejauh hal itu menguntungkan mereka, dan mereka akan menuntut proteksi negara kalau situasi ekonomi tidak menguntungkan perusahaan mereka. Di banyak tempat di seluruh dunia, Bank Dunia berada di balik setiap bisnis PETRANS. Modal besar yang digunakan untuk membangun proyek-proyek besar yang menguntungkan PETRANS tapi menelantarkan jutaan orang miskin dipinjam dari Bank Dunia. Ketika menghadapi protes dari kaum miskin di negara tempat mereka berbisnis, PETRANS tidak akan ragu untuk bersekongkol dengan pemerintah lokal yang korup dan dengan kekuatan uang mereka bisa mengadu-domba orang miskin sehingga mereka terpecah dan berperang melawan satu sama lain.<sup>19</sup>

19 Madeley, John, *Ibid.*, hal. 5-6. Di Indonesia banyak konflik telah terjadi seperti di Aceh, Poso, Maluku Papua Barat and akhir tahun 2011 di Bima, Pulau Sumbawa, serta di banyak negara berkembang lainnya misalnya di Kongo, Sierra Leon, Liberia, Rwanda, Sudan, dan Sudan Selatan, sekedar hanya untuk menyebutkan beberapa contoh. Menurut pelbagai laporan, semua konflik ini tidak murni terjadi karena motif agama atau suku, tapi konflik yang sengaja dibuat oleh kelompok tertentu yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di tanah masyarakat miskin dengan memanfaatkan sentimen-sentimen suku dan agama yang memang sudah ada di dalam masyarakat. Di dalam “air yang sudah keruh” ini, kelompok-kelompok berkepentingan ini membenturkan masyarakat setempat untuk melawan satu sama lain, sehingga mereka merasa tidak aman dan diharapkan cepat atau lambat lari tinggalkan wilayah kediaman mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mander Jerry, *Ibid.*, atau Collin Chuck and Wright Mary, *The Moral Measure of Economy* (New York: Orbis Books, 2007), hal. 130, Klare Michael, *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict* (New York: Owl Books, 2002).

## D. REZIM EKONOMI NEOLIBERAL DI BALIK PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TRANSNASIONAL

PETRANS di sektor pertambangan, yang telah menimbulkan begitu banyak masalah dan membawa kesengsaraan bagi kehidupan masyarakat miskin di berbagai belahan dunia termasuk di Flores dan daerah-daerah lain di Indonesia, hanya merupakan puncak gunung es dari apa yang disebut rezim global ekonomi neoliberal (*global neoliberal economic regime*). PETRANS tidak berbisnis sendirian. PETRANS tidak melakukan bisnis hanya atas kemauan sendiri. Mereka merupakan bagian integral dari Kapitalisme Neoliberal yang mulai mendominasi sistem ekonomi dunia sejak tahun 1980-an dengan meruntuhkan Kapitalisme Liberal atau kadang disebut Kapitalisme Keynesian yang menjadi sistem ekonomi dunia (yang berbarengan atau berlawanan dengan Ekonomi Sosialis Timur/Komunisme) sejak akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, dijaga dan diamankan oleh tiga Lembaga Keuangan Internasional – IMF, Bank Dunia dan GATT/WTO sebagai perangkat intinya dan PETRANS sebagai pelaksana lapangan, sebagai instrumen atau agen-agennya. Atau dalam bahasa populer di mana korupsi sudah berurat-akar, PETRANS tidak lain dari calo-calo (*brokers*) dari rezim ekonomi neoliberal.

### 1. Sekilas sejarah

Dalam rancangannya di Konferensi Bretton Woods, USA pada tahun 1944, tata ekonomi dunia baru ini (*new world economic order*) menganut teori ekonomi pasar bebas dari Adam Smith (1723-1790) dan teori politik ekonomi dari John S. Mill (1806-1873). Menurut teori ekonomi Adam Smith, semua bangsa di dunia akan makmur kalau mereka semua berdagang bersama di dalam sebuah pasar bebas dunia (*global free market*). Untuk itu semua proteksionisme yang menghambat perdagangan bebas seperti yang dipraktikkan pada zaman kapitalisme merkantilis mesti dihapus. Konsep pasar bebas yang diadopsi pada Konferensi Bretton Woods juga diperkuat oleh teori John S. Mill yang menyatakan bahwa perdagangan bersama antarbangsa akan membawa perdamaian dan mencegah terjadinya perang antara bangsa-bangsa. Dengan teori ekonomi Adam Smith and teori ekonomi politik John S. Mill sebagai latar belakang, Konferensi Bretton Woods tahun 1944 merancang tata ekonomi dunia baru dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia dan mencegah perang antara bangsa-bangsa (Peet 2010: 41).

Akan tetapi di Konferensi Bretton Woods sejumlah kalangan menyadari bahwa ekonomi liberal klasik (*classical liberalism, classical economics*) seturut teori Adam Smith dan John S. Mill hanya mungkin terwujud kalau ada saling ketergantungan dan kesetaraan kekuatan ekonomi dan militer di antara bangsa-bangsa yang menjalin perdagangan bersama secara bebas. Tanpa kondisi-kondisi ini, kompetisi sebagai prinsip utama perdagangan bebas demi kemajuan ekonomi yang sehat akan berjalan tidak seimbang dan tidak adil.

Sejak Perang Dunia II berakhir hingga sekarang persis hal ini yang terjadi. Perdagangan dan pasar bebas internasional telah menjadi instrumen dari negara yang kuat secara ekonomis dan politis untuk menguasai negara-negara lain yang kekuatan politik dan ekonominya relatif lemah (Peet 2010: 41). Oleh sebab itu, seperti yang dikritik banyak kalangan dewasa ini, ekonomi liberal yang dirancang Konferensi Bretton Woods sebenarnya hanya cocok untuk dijalankan antara Eropa dan Amerika Utara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang sama, dan tidak bisa diterapkan secara seragam untuk semua bangsa yang lain.<sup>20</sup>

Perdagangan dan pasar bebas internasional yang dirancang di Konferensi Bretton Woods juga pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan pasar kapitalis (*capitalist market*) untuk berkembang secara global melampaui batas negara-negara industri maju. Akan tetapi, berkat pengaruh ahli ekonomi Inggris John Meynard Keynes, Konferensi Bretton Woods memutuskan agar ekspansi pasar kapitalis dari negara-negara industri tetap harus diatur dan dikontrol. Pasar tidak bisa dibiarkan bebas mengatur dirinya sesuka hati, dan untuk itu semua pemerintah bangsa-bangsa harus berpartisipasi dalam mengatur pasar kapitalis.<sup>21</sup> Dan ekonomi pasar dunia yang terkontrol ini yang diterima dan dijalankan oleh dunia melalui IMF, Bank Dunia dan GATT/WTO sejak tahun 1944 hingga tahun 1980-an dan kerap dikenal dengan istilah *Keynesian Capitalism* (Kapitalisme Keynesian) atau *Regulated Capitalism* (Kapitalisme yang Terkontrol).

Sejak diresmikannya lembaga keuangan dunia yang dirancang di Bretton Woods pada akhir Perang Dunia II, dunia pada dasarnya diperintah secara politis dan ekonomis oleh lembaga keuangan yang dalam kenyataan dikontrol oleh sejumlah kecil negara Barat. Ketiga lembaga keuangan ini – IMF, Bank Dunia dan GATT/WTO – merancang dan menjalankan tata ekonomi secara baru untuk seluruh dunia. Tapi dalam rancangan dan pengelolaan IMF dan Bank Dunia, beberapa negara adidaya terutama Amerika Serikat dan Inggris sudah sejak awal berdirinya telah memegang peranan yang sangat dominan dan, menurut Richard Peet, hal ini terjadi bukan karena dilatarbelakangi

20 Paus Paulus VI dalam *Populorum Progressio* Artikel 58 misalnya menyatakan: “Prinsip perdagangan bebas akan berjalan baik dan adil bila bangsa-bangsa yang terlibat di dalamnya mempunyai kekuatan ekonomi yang sama.” Untuk informasi lebih lanjut, lihat Paul VI, *Populorum Progressio*, Rome, 1967.

21 Pada Konferensi Bretton Woods, negara-negara Barat merancang pasar bebas dengan supaya mereka tetap gampang mendapat akses ke negara-negara berkembang bekas jajahan sebagai tempat pelemparan atau penjualan dari produk-produk industri mereka dan sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah (termasuk pelbagai jenis tambang mineral) untuk mensuplai kebutuhan industri. Tentang hal ini Julio de Ana berujar: “Jelas bahwa negara-negara Barat mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat karena mereka bersandar pada dan mendapat keuntungan dari daerah-daerah jajahan yang kini disebut sebagai negara-negara miskin terbelakang”. Untuk info lanjut, lihat Julio de Santa Ana, “How the Rich Nations came to be Rich” in Leonardo Boff & Virgini Elizondo (eds), *Option for the Poor: Challenge to the Rich Countries* (Edinburg: T. & T. Clark Ltd, 1986), hal. 5.

motivasi untuk memajukan dunia tapi karena mereka melihat lembaga keuangan ini sebagai instrumen baru untuk kepentingan ekspansi ekonomi mereka pasca Perang Dunia II. Dilihat dari proses berdirinya, tata ekonomi dunia baru sudah sejak awal penuh dengan ketidakadilan. Konferensi Bretton Woods memang diberi label sebagai konferensi internasional tapi dalam kenyataannya, konferensi waktu itu hanya dihadiri oleh sekelompok kecil negara terutama dari Eropa Barat, Amerika Utara dan beberapa negara dari Amerika Latin. Sedangkan bangsa-bangsa Asia dan Afrika pada umumnya masih sedang dijajah Eropa dan tidak masuk dalam perhitungan. Sebagian besar bangsa-bangsa Afrika baru mulai merdeka dari penjajahan pada tahun 1960-an sampai 1970-an.<sup>22</sup> Konferensi Bretton Woods diselenggarakan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Kebanyakan peserta konferensi tidak cukup menguasai bahasa Inggris dan karena itu tidak mengerti teks-teks panjang tentang teori ekonomi yang dipresentasikan oleh para ahli. Kenyataan lain adalah bahwa sebagian besar rancangan (*draft*) sidang sudah didiskusikan sejak 2 ½ tahun sebelumnya oleh Amerika Serikat dan Inggris. Setelah konferensi selesai, setiap delegasi yang umumnya tidak terlalu menguasai jalannya konferensi pulang ke negaranya dan harus menjelaskan kepada kepala negara masing-masing tentang jalannya konferensi dan meminta mereka untuk ikut meratifikasi pendirian IMF, Bank Dunia, dan GATT/WTO dengan segala aturannya (Peet: 47-59) supaya bisa berpartisipasi dalam peredaran perdagangan dunia.

Kantor IMF dan Bank Dunia harus berada di Washington DC supaya lebih dekat dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk dipantau dan dipengaruhi. Secara teoretis, IMF dan Bank Dunia berada dalam lingkaran perangkat PBB tapi kedua lembaga keuangan ini beroperasi menurut hukum perusahaan, yaitu bahwa pemegang saham terbesar mempunyai kekuasaan tertinggi dan berhak menentukan pelbagai kebijakan bagi perusahaan. Hal yang sama persis terjadi dengan IMF dan Bank Dunia milik sekitar 185 negara. Sejak awal berdirinya, ada lima negara sebagai pemegang saham terbesar di IMF: USA, Jepang, Jerman, Perancis dan Inggris dan mempunyai kekuatan *voting* (hak suara) yang besar pula (Peet: 63-70) dan satu-satunya hak *veto* hanya dimiliki oleh AS (Stiglitz 2002: 12).

## 2. Jeratan utang, Konsensus Washington, dan SAPs

Sistem ekonomi liberal (Kapitalisme Keynesian) yang dianut oleh tata ekonomi dunia baru akhirnya digulingkan pada tahun 1980-an oleh sekelompok kapitalis yang ingin menerapkan pasar bebas tanpa intervensi pemerintah negara seturut teori Adam Smith dan dipraktikkan sebelum Konferensi Bretton Woods tahun 1944. Kelompok ini disebut “neoliberal” karena mereka

<sup>22</sup> “A Chronological List of Independence Dates for Africa,”

<http://africanhistory.about.com/library/timelines/blIndependenceTime.htm> (diakses pada 27 April 2012).

menghidupkan kembali teori “ekonomi pasar bebas klasik” (*classical free trade liberalism*) dari Adam Smith pada akhir abad 19, yang berprinsip bahwa demi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka seluruh urusan perencanaan dan pengembangan ekonomi harus diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan-perusahaan swasta dan sedapat mungkin jauh dari campur tangan pemerintah negara dengan segala macam aturannya.<sup>23</sup> Campur tangan terhadap pembangunan ekonomi seperti penguasaan sektor-sektor vital dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap merugikan karena tidak efisien dan aturan-aturan tertentu seperti proteksionisme terhadap bisnis dalam negeri dalam bentuk tarif impor dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana persis sistem ekonomi liberal tiba-tiba diganti dengan sistem ekonomi neoliberal pada tahun 1980-an?

Meskipun dari tahun 1944 sampai tahun 1980-an tata ekonomi dunia baru sepakat untuk mengadopsi model kapitalisme yang diusulkan John Meynar Keynes yaitu kapitalisme yang tetap dikontrol oleh negara sehingga secara bervariasi kerap disebut sebagai *regulated capitalism* atau *Keynesian Capitalism*, tapi kelompok pendukung teori ekonomi liberal murni ala Adam Smith yang menghendaki kebebasan ekonomi seluas-luasnya dari campur tangan negara tetap eksis. Kelompok ini antara lain dipimpin oleh Friedman dan Frederick von Hayek (Peet 2010:9-10). Pendukung teori pasar bebas dari Adam Smith mendapat momentum yang baik ketika Presiden AS Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher yang memerintah pada tahun 1980-an dan berhasil memengaruhi keduanya. Inti propaganda mereka adalah bahwa ekonomi dunia akan tumbuh pesat dan lebih efisien kalau pemerintah negara tidak campur tangan di dalamnya dan diberikan ruang bebas seluas-luasnya kepada perusahaan swasta seperti yang diajarkan Adam Smith. Tergugah oleh argumentasi ini, Pemerintah Amerika Serikat

23 Tapi hasilnya, seperti kata Richard Peet, privatisasi ekonomi neoliberal hanya membuat negara semakin hilang kedaulatannya, pemerintah dikuasai oleh orang-orang kaya, oleh perusahaan internasional, dan para investor asing. Mereka membiayai kampanye politik dalam rangka pemilu dan menguasai para legislatif melalui para pelobi mereka dalam rangka menggolkan Undang-Undang yang memihak dan menguntungkan bisnis mereka. Informasi lebih lanjut tentang ini, lihat Richard Peet, *ibid.*, hal. 248-249. Tanpa disadari banyak orang, persis hal ini yang sudah terjadi dalam pemerintahan dan politik Indonesia sejak bergulirnya otonomi daerah. Menurut Prof. Dr. Stein Kristiansen, walau gaji para bupati dan gubernur di Indonesia berkisar antara Rp6 juta hingga Rp9 juta/bulan, tapi biaya kampanye seorang calon bupati bisa berkisar antara Rp5 sd Rp20 miliar dan biaya kampanye seorang calon gubernur berkisar antara Rp10 sampai dengan Rp400 miliar. Untuk informasi lanjut tentang ini, lihat Stein Kristiansen, “Recovering the costs of power: Corruption in lokal political and civil service positions in Indonesia” (Workshop di UI Jakarta 16/07/2008, *manuscript*). Padahal kalau seorang gubernur menabung semua gajinya selama 1 masa jabatan, maka pada akhir jabatan ia baru mengumpulkan uang sebesar 5 tahun x 12 bulan x Rp9 juta (ambil gaji tertinggi) =Rp540 juta. Itupun kalau ia tidak makan, tidak minum, dst. Lalu, kelebihan biaya pemilu sebesar Rp399 miliar ia peroleh dari mana? Siapa yang beri? Diberi dalam rangka apa? Kemungkinan ada dua: mereka memanipulasi APBD atau jual kekayaan alam di lahan rakyat atau di hutan lindung untuk digali PETRANS seperti yang marak terjadi di hampir seluruh pelosok Indonesia 10 tahun belakangan ini sejak bergulirnya otonomi daerah.

dalam sebuah kesepakatan, yang kemudian disebut dengan istilah *Washington Consensus*, mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendisiplinkan dan mengatur ekonomi negara-negara miskin sedang berkembang yang hingga tahun 1980-an telah dibebani utang pinjaman di IMF dan Bank Dunia. Tentang hal ini, Joseph Stiglitz mengatakan bahwa sejak itu IMF dan Bank Dunia diutus menjadi misionaris untuk mewartakan atau memaksakan ide pasar ekonomi bebas kepada seluruh dunia termasuk kepada negara-negara miskin (Stiglitz:13). Sewaktu dieksekusi oleh IMF, Konsensus Washington ini diberi nama yang agak “gaul”, populer atau kelihatan begitu mulia: *Structural Adjustment Programs* (SAPs), yaitu seperangkat kebijakan dari IMF yang bertujuan untuk menata kembali ekonomi negara-negara miskin yang dibebani utang pada IMF dan Bank Dunia agar ekonomi mereka lebih produktif sehingga keuntungannya bisa dipakai untuk membayar utang luar negeri termasuk utang yang dipinjam pada IMF dan Bank Dunia pada tahun 1960-an hingga 1970-an.<sup>24</sup> SAPs itu antara lain meliputi pemotongan belanja

24 Umumnya utang luar negeri dari negara-negara berkembang yang sampai sekarang kesulitan untuk dibayar kembali adalah utang yang dipinjam pada tahun 1960-an hingga 1970-an yang dalam kenyataannya banyak yang tidak digunakan sesuai dengan maksud pinjaman. Banyak uang pinjaman pada masa-masa ini jatuh ke tangan pemerintahan diktator atau lain kali dihabiskan membiayai perang untuk memadamkan pemberontakan dalam negeri atau perang saudara yang umumnya terjadi pada tahun-tahun pertama pasca kemerdekaan dari perbudakan oleh bangsa Barat selama 500 tahun. Selain itu, uang pinjaman pada tahun 1960-an hingga 1970-an juga tidak digunakan dengan baik oleh negara-negara Asia dan Afrika karena barusan merdeka; maka umumnya mereka masih sedang belajar bagaimana hidup bernegara yang sesungguhnya. Lebih dari itu, menjelang tahun 1970-an Bank Dunia mulai memberikan pinjamannya/utang sebagai alat geo-politik. Dari tahun 1968 hingga 1973, misalnya, Bank Dunia dengan sengaja membujuk negara-negara sedang berkembang di Selatan untuk meminjam uang pada Bank Dunia dalam jumlah besar dengan dalil untuk percepatan pembangunan. Tapi sebetulnya Bank Dunia mempunyai tujuan politik tersembunyi, yaitu untuk mendekatkan negara-negara ini kepada Blok Barat yang kapitalis dan tidak jatuh ke ribaan Blok Timur Unisoviet Socialist-Komunist. Negara-negara yang diberi pinjaman dipilih secara selektif oleh Bank Dunia sesuai dengan kepentingan politik Blok Barat seperti Mobutu di Zaire dari 1965-1997, Soeharto di Indonesia dari 1965-1998, Marcos di Filipina dari 1965-1986, Pinochet di Chile dari 1973-1990, dan Videla-Viola di Argentina dari 1976-1983. Lebih buruk lagi, uang yang dipinjam ini sebagian didepositokan kembali di Bank Dunia tapi atas nama diktator dan dengan bunga yang lebih rendah dari bunga yang dikenakan Bank Dunia pada pinjaman yang diberikan kepada negara miskin. Sehingga sebagian dari pinjaman ini tetap disimpan kembali di Bank Dunia oleh seorang diktator dari negara miskin, lalu Bank Dunia akan meminjamkan lagi uang tersebut kepada negara lain, termasuk mungkin kepada seorang diktator dari negara lain dengan bunga yang lebih tinggi dan begitu seterusnya. Tapi bagian pinjaman yang didepositkan kembali ke Bank Dunia sebenarnya dipakai sebagai jaminan. Bila sang diktator bersangkutan lalai dalam pembayaran utang negara atau terjadi huru-hara politik, maka deposito sang diktator dipakai sebagai jaminan atau bisa disita oleh Bank Dunia, sehingga pada akhirnya institusi keuangan ini tidak rugi. Peminjaman utang yang diberikan dengan politik tersembunyi seperti ini pada dasarnya tidak etis atau immoral, serta bisa masuk dalam kategori “odious debt” atau utang tidak sah, utang tidak *valid*, dan karena itu seharusnya dihapus. Untuk informasi lanjut tentang ini, lihat Eric Tossain & Damien Millet, *Debt, the IMR, the World Bank: Sixty Questions Sixty Answers* (New York: Monthly Review Press, 2010), hal. 51-65. Dari tahun 1970- 2002, misalnya, total pinjaman Indonesia dari IMF dan Bank Dunia adalah \$232 billion (Rp 2320 miliar) dan \$35

publik/pembangunan (*reducing public expenditures*),<sup>25</sup> reformasi pajak (*tax reform*), liberalisasi pasar ekonomi (*trade liberalization*) dan ekonomi yang kompetitif (*competitive economy*) (Peet:14-15). Melalui kebijakan ini, negara-negara miskin yang berhutang akan bisa mendapat keringanan pembayaran bunga utang lama atau bisa mendapat pinjaman baru dari IMF atau Bank Dunia hanya kalau mereka bersedia menghemat pengeluaran belanja publik, membuka ekonomi negara mereka seluas-luasnya bagi perusahaan asing dan menyerahkan aset-aset publik, yang biasanya sangat vital untuk kepentingan rakyat, untuk dikelola oleh perusahaan swasta termasuk perusahaan swasta dari negara asing atau PETRANS.<sup>26</sup>

Tapi menurut Noam Chomsky, “arsitek utama” dari “Konsensus Washington” yang neoliberal itu adalah para pegiat dari ekonomi swasta, yaitu perusahaan-perusahaan transnasional atau PETRANS yang mengendalikan sebagian besar ekonomi dunia dan mempunyai kekuatan memengaruhi pembentukan kebijakan publik pemerintah.<sup>27</sup> Apa yang diklaim Chomsky juga didukung oleh ahli-ahli ekonomi Amerika, Inggris atau Perancis seperti Joseph Stiglitz, David C. Korten, Al Gedicks, Roger Moody, Richard Peet, Eric Tossain, Susan George, dan David Cromwel yang umumnya sudah tidak simpatik terhadap rezim ekonomi neoliberal. Menurut mereka, ekonomi neoliberal sengaja dirancang oleh PETRANS negara-negara industri untuk menjarah kekayaan alam negara-negara miskin melalui politik utang pada IMF dan Bank Dunia. Sehubungan dengan ini, misalnya, ahli-ahli ini dalam buku-buku mereka tidak merasa sungkan menggunakan kata-kata seperti *looting* atau *plunder*, yang artinya curi, rampok atau rampas. Menurut mereka, negara-negara industri maju telah

---

billion dari pinjam ini diambil oleh Soeharto. Dan kini setiap rakyat Indonesia yang tidak pernah menikmati pinjaman ini harus membayarnya kembali melalui pajak keringat mereka setiap hari. Lihat juga Richard Murphy, “Fiscal Paradise or Tax on Development?” <http://www.richard.murphy.dial.pipex.com/Fiscalparadise.pdf> (diakses pada 2 Januari 2012), hal. 11-12. Kalau harus taat terhadap perintah SAPs dari IMF, maka setiap tahun dalam APBN Indonesia, misalnya, anggaran belanja publik untuk biaya pembangunan harus dipotong atau dikurangi proporsinya. Kalau ini benar, maka tidak heran kalau di daerah-daerah di Indonesia pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum atau listrik, tidak pernah mengalami kemajuan. Bagaimana bisa maju, kalau 60% sampai 70% APBD, yang dikumpul dari pajak keringat rakyat setiap hari, hanya dipakai untuk gaji pegawai negeri dan belanja kantor? Total APBD Kab Ende di Flores untuk 2012, misalnya, Rp 637 miliar. Dari total ini, Rp 412 miliar adalah untuk gaji PNS atau belanja tidak langsung dan hanya Rp 224 miliar untuk belanja pembangunan atau belanja langsung. Hal semacam ini bisa menjadi pemandangan umum untuk seluruh daerah di Indonesia dan semua negara yang dipaksa melaksanakan SAPs oleh IMF atas nama negara-negara industri yang merupakan bosnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat, “Anggaran Belanja Langsung Tahun 2012 Mengalami Penurunan”, <http://portal.endekab.go.id/component/content/article/40-berita/379-anggaran-belanja-lansung-tahun-2012-mengalami-penurunan.html> (diakses pada 28 April 2012).

26 “Structural adjustment Policies” [http://en.wikipedia.org/wiki/Structural\\_adjustment](http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_adjustment) (diakses pada 22/11/2011).

27 Noam Chomsky, “Neoliberalism and the Global Order”. [http://www.thirdworldtraveler.com/Chomsky/NeoliberalismPOP\\_Chom.html](http://www.thirdworldtraveler.com/Chomsky/NeoliberalismPOP_Chom.html) (diakses pada 15 Desember 2011).

dan sedang merampas kekayaan alam orang-orang miskin di negara-negara miskin melalui PETRANS. Tentang hal ini David C. Korten melukiskannya demikian:

Hingga tahun 1980-an PETRANS Amerika Serikat menghadapi dua kesulitan. Pertama, Jepang dan empat negara industri baru Asia seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong telah berhasil menembus pasar Amerika. Kedua, PETRANS Amerika Serikat pada saat yang bersamaan mengalami kesulitan untuk menembus ekonomi negara-negara Asia dan Amerika Latin karena proteksi pemerintah terhadap industri dalam negeri dan regulasi mereka yang ketat terhadap investasi asing. Kebijakan ekonomi negara-negara Selatan ini menghalang PETRANS Amerika untuk berbisnis secara bebas. Oleh karena pajak yang tinggi terhadap perusahaan dan pendapatan investor asing serta undang-undang lingkungan hidup dan tenaga kerja yang ketat, PETRANS Amerika Serikat merasa seperti lumpuh dalam kompetisi ekonomi global” (Korten 1996: 63).

Kelumpuhan perusahaan-perusahaan AS berakhir dengan terpilihnya Ronald Reagan sebagai President AS (1981-1989). Reagan menyelamatkan perusahaan-perusahaan Amerika dengan menggunakan kekuasaan besar AS di IMF dan Bank Dunia sebagai pemegang saham terbesar. Hingga tahun 1980-an tampaknya utang dari negara miskin yang sedang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang dipinjam tahun 1960-an dan 1970-an dari Bank Dunia dan IMF sudah menumpuk dan tidak bisa dibayar pada waktunya. Maka, melalui IMF dan Bank Dunia Pemerintah AS menuntut negara-negara miskin untuk mereformasi ekonomi mereka dengan macam-macam persyaratan (note: ingat Konsensus Washington dan SAPs dari IMF) termasuk memaksa negara-negara ini membuka pintu mereka bagi perusahaan AS. Tentang hal ini David Korten menguraikannya lebih lanjut demikian:

IMF dan Bank Dunia, yang didominasi oleh AS, merestrukturisasi ekonomi Negara-negara Selatan yang dibebani utang untuk memaksa mereka dipenetrasi perusahaan-perusahaan asing. Restrukturisasi ekonomi yang dipaksakan IMF dan Bank Dunia menuntut pemerintah negara-negara miskin untuk mencabut proteksi-proteksi yang diberikan terhadap ekonomi dan industri dalam negeri mereka, menghapus bea cukai terhadap barang-barang impor dari Negara-negara Utara dan menghilangkan regulasi yang menghambat investasi asing. Perusahaan-perusahaan AS dimobilisasi untuk memulihkan agenda politik perusahaan dan sistem peradilan. Dalam agenda politik, reformasi domestik dilakukan untuk memperbaiki daya kompetitif global AS dengan mengharuskan pemerintah negara mengundurkan diri dari urusan ekonomi. Pajak terhadap orang kaya diturunkan secara drastis. Pengekangan pada merger dan akuisisi perusahaan dihapus. Penegakan terhadap undang-undang lingkungan hidup dan buruh menjadi lemah. Pemerintah yang memihak perusahaan AS yang agresif berusaha membuat diri mereka lebih kompetitif secara global dengan memecah-belah kekuatan serikat buruh, mengurangi upah dan kesejahteraan,

merampingkan tenaga kerja perusahaan dan memindahkan operasi manufaktur ke luar negeri untuk mendapatkan untung karena tenaga kerja murah dan peraturan yang longgar...Sebagai akibatnya, pendapatan investor-investor besar, para manager, bintang atletik and calo-calo investasi melangit. Jumlah *billionaires* di AS bertambah dari hanya satu orang pada tahun 1978 menjadi 120 orang *billionaires* baru pada tahun 1994 (Korten:64).<sup>28</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa PETRANS yang menjelajahi desa-desa di Indonesia dan juga di negara-negara berkembang lainnya di Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Selatan tidak bisa dilihat secara terlepas dari negara-negara industri kaya di belahan bumi Utara dan lembaga keuangan internasional – IMF, Bank Dunia dan WTO, walau lembaga yang terakhir ini kurang disoroti dalam diskursus pendek ini. Negara-negara industri maju sesungguhnya berada di balik semua perusahaan yang beroperasi di negara-negara berkembang termasuk yang sedang menambang mineral dengan menghancurkan lahan pertanian dan hutan lindung di pulau-pulau kecil di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. PETRANS hanya merupakan kaki tangan mereka atau calo-calo dari rezim ekonomi neoliberal. Bank Dunia secara rutin meminjamkan uang kepada banyak PETRANS untuk melakukan bisnis di seluruh dunia termasuk di sektor pertambangan<sup>29</sup> dan di samping

---

28 Teks asli Inggris dan terjemahan Indonesia dari saya. Tentang poin kedua dari terakhir sehubungan motivasi pemindahan manufaktur negara industri ke luar negeri, kita bisa lihat sebagai contoh pabrik mobil AS dipindahkan ke Meksiko, pabrik Sepatu Nike AS dipindahkan ke Jakarta, pabrik tekstil Inggris dan AS dipindah ke Bangladesh. Seorang buruh perempuan di pabrik tekstil Inggris di Banglades tahun 2006 bekerja selama 80 jam seminggu (padahal normalnya seroang buruh hanya bisa kerja 48 jam seminggu kalau 6 hari x 8 jam/hari), digaji antara £8 sampai £16 per bulan atau sekitar Rp Rp 120.000 hingga Rp240.000 per bulang. Sangat kejam dan tidak manusiawi. Untuk informasi lebih lanjut, bisa lihat “UK firms ‘exploiting Bangladesh,” <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6219274.stm> (diakses 28 April 2012). Atau seorang buruh pabrik sepatu Nike di Jakarta pada tahun 1992 digaji sebesar \$1.35 per hari atau sekitar Rp 10.000/hari atau sekitar Rp 260.000/bulan (kalau hari minggu libur). Sementara Perusahaan Sepatu Nike membayar Bintang Bola Basket Mikhael Jordan untuk iklan Sepatu Nike sebesar \$20.000.000 pada tahun 1992 atau \$20 juta x Rp 9.000 = Rp 180 miliar. Jadi Michael Jordan tanpa kerja sedikitpun mendapat uang jauh lebih besar dari total seluruh gaji tahunan dari ribuan pekerja buruh pabrik Sepatu Nike AS di Jakarta. Kalau buruh di Jakarta tuntutan kenaikan gaji, pabrik Sepatu Nike, seperti lazim dibuat oleh PETRANS lainnya, akan angkat kaki dan pindahkan pabrik Sepatu Nike di negara lain yang gaji buruhnya lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Drimmelen, Rob Van. *Faith in Global Economy: A Primer for Christians* (Geneva: WCC Publications, 1998), hal. 41.

29 Bank Dunia sendiri terdiri dari lima unit dan dua di antaranya yaitu IFC (*International Finance Corporations*) dan MIGA (*Multilateral Investment Guarantee Agency*) berperan untuk memberi pinjaman and asuransi kepada PETRANS di seluruh dunia termasuk yang beroperasi di sektor pertambangan yang merusak lingkungan dan sumber-sumber hidup orang miskin di negara-negara berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Richard Peet, *Ibid.*, hal. 128. PT Freeport yang beroperasi di Papua Barat merupakan salah satu PETRANS yang pemegang sahamnya adalah Bank Dunia khususnya unit IFC dan memperoleh pelayanan asuransi dari MIGA yang disebut *Political Risk Insurance* (PRI). Dari tahun 1993 hingga 2001 IFC menanam investasi di dalam 33 proyek pertambangan di seluruh dunia sebesar \$681.000.000. Dalam Kebijakan Operasionalnya menyangkut Pemindahan Paksa (*Involuntary Resettlement*) pada

akan menerima kembali modal pinjaman pokok, negara-negara industri pemegang saham terbesar dari Bank Dunia menikmati bunga pinjam dan dividen secara rutin setiap tahun, yang tidak lain merupakan keuntungan yang diperoleh dari penggalian kekayaan alam orang-orang miskin di negara-negara miskin oleh PETRANS swasta yang berbasis di negara-negara industri.

## E. DAMPAK NEGATIF SAPs BAGI NEGARA-NEGARA MISKIN

Inti *credo* rezim ekonomi neoliberal, yang dirancang negara-negara industri maju dan dipaksakan kepada negara-negara miskin yang sedang berkembang melalui SAPs oleh IMF dan Bank Dunia, berkisar pada empat hal pokok: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustained economic growth*), pasar bebas (*free markets*), liberalisasi ekonomi (*economic globalization*), dan privatisasi (*privatization*). Dalam lingkaran ideologi ekonomi neoliberal ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari sebuah negara, yang lazimnya diukur dengan *Gross National Product* (GNP) atau Produksi Nasional Bruto, dilihat sebagai jalan untuk mencapai peningkatan kemakmuran hidup manusia (*a path to human progress*). Dan untuk mencapai hal ini, yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pasar dan perdagangan antara bangsa-bangsa harus dibuka seluas-luasnya tanpa dirintangi oleh pelbagai macam regulasi seperti bea cukai terhadap barang impor (*free markets and economic liberalization* atau *economic globalization*). Negara harus membuka diri seluas-luasnya bagi perusahaan asing atau PETRANS. Semua aset vital yang menguasai hidup orang banyak yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan negara (BUMN) harus diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan swasta nasional atau perusahaan transnasional (*economic privatization*) untuk menjamin efisiensi dan kompetisi usaha ekonomi seluas-luasnya (Korten:72-73).

Apakah misi ekonomi neoliberal melalui SAPs telah mencapai tujuan yang diusungnya, yakni meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan kemakmuran negara-negara miskin yang sedang berkembang di seluruh dunia khususnya di belahan bumi Selatan? Kenyataan yang terjadi selama ini menunjukkan jauh panggang dari api. Program restrukturisasi ekonomi atau *Structural Adjustment Programs* (selanjutnya akan digunakan saja singkatannya: SAPs)

tahun 2002, Bank Dunia menyetujui pemindahan masyarakat setempat dari tanah mereka, biarpun hal ini nyata-nyata akan memiliki dampak negatif yang sangat merugikan kelangsungan hidup budaya masyarakat lokal. Kebijakan Bank Dunia ini berisi ketentuan yang mengurangi/melanggar hak-hak sumber hidup dari masyarakat adat tradisional di dalam kawasan wisata nasional dan daerah-daerah khusus yang diakui dan dilindungi secara hukum oleh negara. Tahun 1997 Bank Dunia memaksa privatisasi PT Vale milik BUMN Brazil tanpa peduli protes ribuan masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi produksi perusahaan dengan memberantas KKN. Tapi dalam kenyataannya, Bank Dunia sendiri justru tidak luput dari praktik KKN seperti suap (*bribery*). Informasi lebih lanjut tentang semua hal ini bisa lihat Moody Roger, *The Risks We Run: Mining, Communities and Political Risk Insurance* (London: International Books, 2005), hal. 78-85, 108-135. Sedangkan informasi lebih lanjut mengenai PRI (*Political Risk Insurance*) yang menjamin PETRANS dalam operasi bisnis mereka di seluruh dunia, lihat Roger Moody, *Ibid.* hal. 5-10.

yang dipaksakan oleh rezim ekonomi neoliberal melalui IMF dan Bank Dunia kepada negara-negara miskin di seluruh dunia menuai banyak kritik karena dampak negatif yang ditimbulkannya.

## 1. Penghapusan subsidi kebutuhan pokok

Di negara berkembang, pemerintah biasanya memberi subsidi pada sektor-sektor vital sehingga masyarakat miskin tetap bisa mendapat akses terhadap sumber-sumber kebutuhan pokok dengan harga yang bisa dijangkau seperti beras/roti, gula, minyak, dan listrik. Tapi oleh SAPs dari IMF dan Bank Dunia semua subsidi bagi sektor-sektor vital ini harus diakhiri demi penghematan anggaran negara, dan porsi penghematan ini dipakai untuk membayar utang pada IMF dan Bank Dunia yang umumnya “odious debts”. Akibat dari pil pahit SAPs ini langsung dirasakan. Harga barang kebutuhan pokok seperti makan naik secara drastis. Para petani yang jual sayuran di kota tak mampu menjaga keseimbangan antara pemasukan dari jualan sayur dengan biaya transportasi yang tinggi karena penghapusan subsidi BBM. Di banyak negara miskin, protes dan demonstrasi akhirnya tidak bisa terhindarkan (Tossain:106). Tentang revolusi besar tahun 1998 di Indonesia, media massa Indonesia sangat memusatkan perhatiannya pada KKN rezim Soeharto dan kroni-kroninya sebagai alasan dan latar belakang dari gerakan protes rakyat/mahasiswa dan memang hal ini benar demikian. Tapi Richard Peet mencatat bahwa revolusi Indonesia pada tahun 1998 yang menelan begitu banyak korban nyawa dan harta benda pada mulanya disebabkan oleh penerapan SAPs dari rezim ekonomi neoliberal yang diusung IMF dan Bank Dunia yang mengubah fundamental ekonomi Indonesia. IMF memberikan paket pinjaman baru sebesar \$40 miliar kepada Indonesia dengan persyaratan pemerintah Indonesia harus menghapus subsidi bahan pokok termasuk makanan dan BBM serta devaluasi mata uang rupiah (Peet:101-102). Alhasil, ekonomi Indonesia ambruk. Nilai rupiah jatuh menjadi \$1=Rp 12.000 bahkan sempat lebih. Sejumlah bank swasta terpaksa dilikuidasi.

## 2. Pengurangan anggaran untuk sektor-sektor sosial

Demi kelancaran pembayaran kembali utang pada IMF dan Bank Dunia, negara-negara penghutang diwajibkan memotong atau mengurangi anggaran publik, yaitu anggaran belanja negara untuk kepentingan rakyat yang sifatnya tidak produktif secara ekonomis seperti anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan atau infrastruktur – jalan raya, pelabuhan atau pasar (Tossain:107). Sehingga tidak heran kalau porsi untuk belanja pegawai dan birokrasi dari APBN/APBD di Indonesia selama ini sering lebih besar daripada porsi untuk belanja publik atau belanja pembangunan (jalan raya, pendidikan, kesehatan dll) karena bagian ini sudah dipotong untuk bayar utang pada IMF dan Bank Dunia.

### 3. Penurunan nilai mata uang atau devaluasi

Tujuan tersembunyi dari devaluasi mata uang adalah untuk meningkatkan ekspor barang mentah negara berkembang ke negara maju dengan harga murah dan kompetitif di pasar global. Akan tetapi, agar bisa mendapat jumlah valuta asing (uang internasional yang dalam hal ini dollar) dalam jumlah yang banyak maka negara berkembang harus meningkatkan kuantitas eksportnya dan untuk itu mereka harus mengeksploitasi alam mereka habis-habisan yang kemudian berakibat pada krisis lingkungan, misalnya, karena pengalihan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan (Tossain:107). Oleh *illegal* atau *legal logging* dan pembukaan perkebunan kelapa sawit yang masif dalam rangka meningkatkan ekspor ke luar negeri, hutan belantara Kalimantan sisa hanya 73.7% pada tahun 1985 dan hanya 44.4% pada tahun 2010.<sup>30</sup> Selama zaman Orde Baru, transmigrasi dikenal sebagai salah satu program pembangunan yang sangat populer dari rezim Soeharto. Seluruh bangsa Indonesia disampaikan bahwa program ini dibuat dalam rangka mengatasi kepadatan penduduk Jawa dan Madura. Tapi menurut Mikhael Klare, program transmigrasi juga mempunyai tujuan terselubung, yaitu untuk menyuplai tenaga kerja di kebun-kebun karet dan kelapa sawit, misalnya di Kalimantan pada area hutan yang harus ditebang seluas 5,7 juta hektar, untuk kepentingan ekspor (Klare 2001: 206). Hampir pasti program transmigrasi yang ditujukan ke pulau-pulau lain seperti Sulawesi dan Papua Barat juga mempunyai muatan motivasi tersembunyi yang sama.

### 4. Pembukaan pasar bebas dengan menghapus bea cukai impor

Menurut para pendukung sistem ekonomi neoliberal, pembukaan pasar bebas bertujuan sangat mulia, yakni untuk menjamin harga barang di pasar tetap murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat miskin dari setiap negara. Namun demikian, pasar bebas juga sekaligus membuka pintu lebar bagi perusahaan-perusahaan asing untuk masuk secara bebas. Perusahaan asing, yang umumnya berasal dari negara industri, bisa menghancurkan produk-produk industri dalam negeri karena harga produk impor yang dibawa perusahaan asing biasanya jauh lebih rendah. Lalu setelah perusahaan lokal hancur, perusahaan asing akhirnya memonopoli pasar dan menaikkan kembali harga barang impor mereka. Selain itu, kompetisi dalam pasar bebas antara produk-produk industri domestik dari negara berkembang dan produk-produk industri dari negara-negara industri maju pada dasarnya bukan merupakan sebuah kompetisi yang adil. Karena di satu pihak SAPs menuntut pemerintah negara-negara miskin untuk menghapus segala macam bentuk subsidi pembangunan termasuk di bidang ekonomi industri, tapi negara-negara industri sendiri sesungguhnya tetap memberi subsidi untuk perusahaan-

30 Rhett A. Butler, "Borneo," in <http://www.mongabay.com/borneo.html> (diakses pada 14 Maret 2012).

perusahaan mereka khususnya di bidang pertanian. Tentang hal ini, kata Eric Tossain, total subsidi yang dianggarkan oleh negara-negara industri di belahan bumi Utara untuk industri pertanian mereka berjumlah \$1 miliar/hari atau sekitar \$350 miliar/tahun. Subsidi ini merupakan salah satu faktor yang menjamin kualitas produk barang impor negara-negara industri dan tetap bisa dijual dengan harga murah. Sementara di pihak lain, negara-negara berkembang di Selatan diwajibkan SAPs untuk tidak memungut bea cukai terhadap barang-barang yang diimpor perusahaan asing atau PETRANS.<sup>31</sup>

## 5. Liberalisasi pasar modal

Liberalisasi SAPs pada awalnya bertujuan untuk membuka ekonomi negara-negara berkembang bagi investasi modal dan pemasaran barang-barang buatan dari negara-negara industri oleh PETRANS. Selain itu liberalisasi SAPs juga diciptakan untuk menghilangkan semua halangan dalam bentuk regulasi pemerintah negara-negara berkembang yang merintang PETRANS negara industri untuk mengirim uang keuntungan (*profit*) dari bisnis perusahaan mereka ke negeri asalnya. Pada tahun 2006, misalnya, total keuntungan yang diperoleh dan dikirim pulang ke negeri asal oleh semua PETRANS yang sedang berbisnis di semua negara berkembang berjumlah sebesar \$238 miliar dan jumlah ini melebihi setengah dari bantuan asing (*foreign aid*) untuk semua negara miskin di seluruh dunia oleh negara-negara industri (Tossain:114). Sehingga pertanyaannya: “*Who is helping whom?*” atau siapa membantu siapa? Jawabannya jelas: negara-negara miskin membantu negara kaya. Dalam pasar

31 Eric Tossain, *ibid.*, 110-111. Selain kecurangan ini, kompetisi ekonomi pasar bebas untuk meningkatkan kemajuan ekonomi setiap negara peserta mengandung kesalahan yang sangat mendasar. Karena sebuah kompetisi biasanya selalu dibuat antara peserta yang berada dalam satu level yang mempunyai tingkat kekuatan yang rata-rata sama. Misalnya dalam tinju, petinju kelas berat hanya bisa lawan petinju kelas berat juga dan bukan lawan tinju kelas terbang. Partai bola kaki Grup A tidak bisa melawan partai bola kaki Grup D. Kalau ini sampai terjadi, selain pertandingan akan berlangsung tidak seimbang, pertandingan ini juga tidak adil. Demikian juga kompetisi pasar bebas ekonomi yang dipaksakan sistem ekonomi neoliberal. Negara-negara berkembang di Asia Selatan, Amerika Selatan, dan Afrika tidak bisa berkompetisi secara seimbang dengan negara-negara Utara yang ekonominya berbasis industri maju. Singkat kata, kompetisi pasar bebas ekonomi yang dipaksakan rezim ekonomi neoliberal ini berlangsung tidak seimbang dan tidak adil karena tingkat ekonomi negara-negara para pesertanya tidak berada pada kelas yang sama. Dan yang jelas, negara-negara industri pasti akan selalu menang dan beruntung, semakin kaya, semakin maju dan negara-negara miskin sebaliknya semakin terpuruk. Persis ketidakadilan ini yang diingatkan Paus Paulus VI dalam Ensiklik *Populorum Progressio* Artikel 58: “Jelaslah bahwa prinsip perdagangan bebas dengan sendirinya tidak cukup memadai untuk mengatur perjanjian ekonomi internasional. Ia bisa berjalan baik hanya kalau kedua pihak kurang lebih sama kuat secara ekonomis, dan dalam kasus seperti itu kompetisi ekonomi secara bebas bisa memacu kemajuan dan ada hasilnya. .... Tapi hal ini akan cukup berbeda ketika negara-negara yang terlibat dalam kompetisi ekonomi pasar bebas ini sangat tidak setara. Harga barang di pasar bebas yang disepakati dapat berubah menjadi tidak adil. Karena itu, harus diakui secara terbuka bahwa prinsip dasar liberalisme sebagai norma untuk pasar bebas terbuka untuk dipertanyakan kembali secara serius.” Informasi lanjut, lihat Paus Paulus VI, *Populorum Progressio*, Rome, 26 Maret, 1967.

dan perdagangan bebas (*free trade and free market*) yang dipaksakan rezim ekonomi neoliberal, uang dan kekayaan alam orang miskin di negara-negara miskin di belahan bumi Selatan lebih banyak mengalir ke luar menuju negara-negara industri di belahan bumi Utara dan bukan sebaliknya.<sup>32</sup> Sehingga demikian, dalam sistem ekonomi neoliberal negara-negara industri yang sudah kaya menjadi semakin kaya<sup>33</sup> dengan mempermiskinkan negara-negara miskin dan menguras kekayaan alam mereka.

Jumlah bantuan asing (*foreign aid*) yang diberikan negara-negara industri setiap tahun kepada negara-negara berkembang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh negara-negara industri dari negara-negara miskin melalui operasi bisnis sekitar 80.000 PETRANS mereka di negara-negara miskin di macam-macam sektor kehidupan mulai dari pengusaha air minum sampai gali tambang mineral dengan menghancurkan secara permanen kebun-kebun petani miskin dan hutan lindung di wilayah mereka. Bantuan asing (*foreign aid*) tahunan yang diberikan itu sesungguhnya hanya merupakan pengembalian sebagian kecil dari keuntungan yang negara-negara industri peroleh dari negara-negara miskin melalui operasi bisnis PETRANS. Tentang ketidakseimbangan antara bantuan negara industri di satu pihak dan kekayaan negara-negara miskin yang diambil oleh negara-negara industri, Eric Tossain katakan demikian: “*The North gives sparingly with one hand what it extravagantly*

32 Belum lagi negara-negara miskin menderita kehilangan banyak uang oleh apa yang disebut “tax havens”, yaitu sejumlah negara atau bagian wilayah tertentu sebuah negara yang menjadi tempat aman untuk menyembunyikan uang orang-orang kaya atau uang para koruptor yang diperoleh secara tidak terpuji. Oleh karena di tempat-tempat “tax havens” (seperti Hong Kong, Maccao, Swiss, Luksemburg, London, New York, Tel Aviv, Frankfurt, Kepulauan Karibia) yang dikenakan pajak yang relatif kecil atau tanpa pajak sama sekali dan biasanya dilengkapi dengan sistem perbankan yang ketat dan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi, orang-orang kaya dan koruptor dari negara-negara berkembang sering menyembunyikan uang mereka di sana. Menurut laporan Richard Murphy, total kerugian negara-negara miskin karena pelarian uang ini adalah \$600 miliar setiap tahun atau sekitar 12 kali jumlah bantuan tahunan untuk seluruh negara berkembang di dunia dalam rangka mencapai *Millennium Development Goals* (MDGs) dari PBB. Dengan kata lain, jumlah bantuan asing tahunan yang diberikan kepada semua negara berkembang dalam rangka mencapai MDGs dari PBB hanya 1/12 dari nilai kekayaan negara-negara berkembang yang dibawa keluar dari negara mereka. Informasi lebih lanjut lihat Richard Murphy BSc FCA, “Fiscal Paradise or Tax on Development?” in <http://www.richard.murphy.dial.pipex.com/Fiscalparadise.pdf> (diakses pada 1 Mei 2012), hal. 13-14.

33 Menurut William Rees yang dikutip David Korten, sejumlah masyarakat industri Eropa mengonsumsi barang dalam jumlah yang melampaui kemampuan alamnya menghasilkan barang kebutuhan bagi penduduknya. Penduduk Belanda, misalnya, mengonsumsi barang dan jasa sebanyak 14 kali kemampuan tanah Belanda menghasilkan barang kebutuhan bagi penduduknya. Itu artinya tanah Belanda sebenarnya hanya bisa menghasilkan satu porsi barang kebutuhan, sedangkan kekurangan 13 porsi lainnya mesti dicari di negara-negara lain melalui perdagangan. Kalau saat ini penduduk Belanda berjumlah sekitar 16.500.000 jiwa, maka lebih dari 15 juta penduduknya hidup dari keuntungan perusahaan mereka yang beroperasi di negara-negara lain. Informasi lebih lanjut lihat David Korten, *Ibid.*, hal. 33. Tidak heran, Belanda merupakan satu dari 5 negara industri Eropa yang menjadi pemilik lebih dari ½ dari sekitar 80.000 PETRANS saat ini.

*takes back with the other*” atau “Negara-negara industri di Utara memberi sedikit dengan tangan yang satu apa yang mereka ambil dengan sangat banyak oleh tangan yang lain” (Tossain: 114).

## 6. Rezim ekonomi neoliberal mencaplok kedaulatan negara dan merusak demokrasi

Semua peraturan dan persyaratan restrukturisasi ekonomi negara-negara berkembang yang dipaksakan oleh rezim ekonomi neoliberal di bawah pimpinan tujuh negara industri atau G7, melalui IMF, Bank Dunia, dan WTO membuat pemerintah negara-negara ini kehilangan kedaulatannya. Mereka tidak lagi sepenuhnya menjadi tuan atas diri mereka sendiri. Mereka kehilangan kekuasaan untuk mengatur diri sendiri dan menentukan sendiri masa depannya termasuk di bidang ekonomi. Aturan SAPS yang menuntut pemerintah negara berkembang menghapus pungutan bea cukai atas barang impor, liberalisasi pasar modal dengan menghapus kontrol negara terhadap aliran modal masuk dan keluar negeri, dan privatisasi aset-aset vital yang menguasai hayat hidup orang banyak, yang biasanya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, jelas merupakan sebuah pencaplokan atas kemerdekaan bangsa lain untuk mengatur dirinya sendiri di bidang ekonomi. Hingga saat ini banyak negara miskin terpaksa mengorbankannya karena sudah terlebih dahulu dijerat utang.<sup>34</sup>

34 Mengenai beban utang luar negeri khususnya pada IMF dan Bank Dunia serta program SAPS yang membuat negara berkembang kehilangan kedaulatannya bisa diumpamakan secara sederhana sebagai berikut. Saya misalnya meminjam uang si Thomas sebesar 70.000.000 dengan bunga berbunga sebesar 15% per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Kalau saya tak pernah bayar bunga secara cicil, maka total bunga yang berbunga plus pokok pada tahun kelima adalah 140.794.990. Jumlahnya sudah dua kali jumlah utang pinjaman awal. Lalu pada waktu Thomas menagih utang ini pada tahun kelima, ternyata saya tidak bisa bayar karena, misalnya, bisnis saya merugi. Menghadapi situasi ini, Thomas pasti tidak akan mau membunuh saya atau lakukan tindakan fatal lainnya karena kalau tidak iadia akan rugi. Kemungkinan yang ia lakukan adalah demikian. Ia semakin sering datang ke rumah saya dan mulai mengatur ekonomi keluarga saya. Kalau saya petani kopi, misalnya, maka ia akan menuntut supaya ia memetik kopi saya sekian hektar sampai sekian puluh tahun. Kebun coklat, kelapa, dan cengkeh saya ia minta demikian juga. Selain itu ia juga minta keluarga saya untuk menghemat pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Dari biasa makan nasi 3x sehari dengan 30kg beras/bulan, ia minta supaya kami cukup beli 20kg beras/bulan dan untuk sarapan pagi keluarga saya diharuskan cukup makan singkong. Keluarga saya juga diharuskan makan setiap hari tanpa lauk, dan begitu seterusnya. Semua ketentuan yang dituntut Thomas ini bertujuan supaya saya bisa sisihkan uang untuk bayar utang Rp140.794.990. Kalau keadaan sudah demikian, maka saya sesungguhnya sudah kehilangan kedaulatan ekonomi rumah tangga. Urusan makan minum keluarga saya sudah dikuasi oleh Thomas. Dengan kata lain, keluarga saya sudah berada di bawah jajahan Thomas karena beban utang. Program SAPS dari rezim ekonomi neoliberal yang dieksekusi oleh IMF dan Bank Dunia kurang lebih demikian. Negara-negara berkembang kehilangan kedaulatan ekonomi karena beban utang. Tapi seperti dideskripsikan pada catatan kaki sebelumnya, utang pinjaman pada IMF dan Bank Dunia tahun 1960-an/1970an itu sesungguhnya banyak yang masuk dalam kategori “odious debts” atau utang tidak sah, tidak *fair* dan tidak halal.

Selain itu rezim ekonomi neoliberal juga menodai dan sekaligus merusak demokrasi karena resep restrukturisasi dari IMF dan Bank Dunia dalam bentuk SAPs tidak ditempuh melalui proses yang demokratis dan tidak transparan. Restrukturisasi ekonomi *top-down* yang dirancang nun jauh di kantor IMF dan Bank Dunia di Washington DC merusak demokrasi dengan memaksa pemerintah negara berkembang yang dipilih melalui pemilu untuk lebih taat kepada pembesar IMF dan Bank Dunia daripada rakyat yang telah memilih mereka.<sup>35</sup> Potensi untuk bersikap tidak bertanggungjawab dan koruptif bisa menjadi semakin subur.

## 7. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan

Sistem ekonomi neoliberal tidak pro-lingkungan. Kompetisi ekonomi secara bebas sebagai prinsip untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mendorong negara-negara berkembang untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam mereka secara berlebihan. Untuk memperoleh valuta asing sebanyak-banyaknya dalam rangka membayar utang luar negeri atau supaya bertahan dalam kekuasaan dan terpilih lagi dalam pemilihan berikut, para pemerintah lokal negara-negara berkembang akan cenderung mengeksploitasi alam seperti mineral dan minyak secara berlebihan, mengancam keberagaman hidup (*biodiversity*), dan bisa memicu terjadinya penggundulan hutan, erosi, dan banjir (Tossain:256). Oleh karena sistem ekonomi neoliberal bebas dari pelbagai macam peraturan pemerintah negara, maka industri-industri baru dan pelbagai macam perusahaan yang melakukan usaha akan cenderung untuk tidak mepedulikan kerusakan alam. Yang ada dalam benak mereka hanya satu hal: mengejar keuntungan.

## F. ILUSI PERTUMBUHAN NEOLIBERAL

Selain dampak-dampak negatif yang telah dideskripsikan sebelumnya, hal lain yang juga mendapat kritikan tajam dari banyak ahli ekonomi akhir-akhir ini terhadap sistem ekonomi neoliberal berpusat pada obsesinya tentang pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Seperti tampak dalam resep SAPs dari IMF dan Bank Dunia, para pengusung ideologi ekonomi neoliberal memaksa negara-negara yang sedang berkembang yang terbebani utang untuk menerima keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan jalan menuju kemajuan manusia (*economic growth is the path to human progress*) (Korten:110). Lalu pertumbuhan itu diukur dengan produk domestik bruto atau GNP (*gross national product*), yaitu total nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua warga negara dan pemodal selama satu tahun.<sup>36</sup>

35 Anup Shah, "Structural Adjustment—a Major Cause of Poverty", <http://www.globalissues.org/article/3/structural-adjustment-a-major-cause-of-poverty> (diakses pada 21 September 2011).

36 "Gross National Product" in *FreeDictionary*, <http://www.thefreedictionary.com/>

Menurut logika ekonomi neoliberal, semakin banyak produk barang dan jasa yang dihasilkan setiap tahun maka pemenuhan kebutuhan masyarakat juga semakin tinggi. Karena itu masyarakat diharapkan untuk belanja dan belanja terus untuk menghabiskan barang yang dijual di pasar. Kalau barang di pasar terjual hingga habis maka pemodal atau perusahaan mendapat uang masuk dengan sejumlah keuntungan (*profit*), lalu dengan yang masuk dan keuntungan baru mereka memproduksi lagi barang baru lebih banyak lagi pada tahun berikut dan untuk itu tentu harus digali bahan mentah baru lebih banyak lagi, dan sesudah itu masyarakat dihimbau membeli/mengonsumsi semua produk barang dan jasa pada tahun bersangkutan sampai habis, dan begitu seterusnya.<sup>37</sup>

Tapi yang menjadi pertanyaan adalah pertumbuhan ekonomi yang demikian itu sampai di mana batasnya? Dari logika pengusung sistem ekonomi neoliberal, pertumbuhan ekonomi itu tidak ada batasnya. Tampaknya sistem ini diidealkan tidak boleh ada batasnya dan tidak boleh berhenti dalam pertumbuhannya. Kalau kita mengukur pertumbuhan ekonomi itu hanya secara fisik, maka Eropa dan AS sudah penuh dengan produks barang dan jasa, di mana ruang tempat tinggal sudah dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dan apartemen yang lebar dan raksasa. Gunung dan bukit sudah dilubangi (*tunnel*) untuk jalan tol (*highways*) dan rel kereta api. Sebahagian besar warga masyarakatnya memiliki mobil pribadi. Di mana-mana, hampir semua pinggir jalan, baik di kota besar maupun kota kecil, penuh dengan parkir mobil pribadi. Tapi menurut pengusung ekonomi neoliberal, Eropa dan AS yang demikian harus tetap membangun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memproduksi dan mengonsumsi barang sebanyak-banyaknya secara meningkat setiap tahun. Kalau ekonomi masyarakat Eropa dan AS saja harus tumbuh terus seperti yang diamanatkan pengusung ekonomi neoliberal, apalagi negara miskin yang sedang berkembang di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin.

---

gross+national+product (diakses pada 3 Mei 2012).

37 Menurut logika ekonomi neoliberal, sebagai akibat dari peningkatan produksi barang dan jasa, masyarakat semakin puas, makmur dan bahagia. Jadi, untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat dalam sebuah negara, perusahaan-perusahaan swasta, baik nasional maupun transnasional, bebas dari campur tangan pemerintah negara, harus berkompetisi untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya agar bisa dikonsumsi sebanyak-banyaknya oleh masyarakat. Kalau volume produksi dan volume konsumsi masyarakat naik terus satu tingkat lebih tinggi setiap tahun, maka ekonomi dikatakan tumbuh dan tentu kepuasan, kemakmuran, dan kebahagiaan masyarakat sebagai konsumen juga ikut naik.. Tapi menurut Tim Jackson, logika pertumbuhan ekonomi seperti ini merupakan sebuah mitos alias palsu. Karena soal kemakmuran itu melampaui kepuasan material. Ia ditentukan juga oleh faktor-faktor lain seperti kualitas relasi dengan dan kepercayaan terhadap sesama. Bukti tentang hal ini sangat kasat mata: masyarakat Eropa dan AS yang sangat konsumtif atau tingkat pemenuhan kepuasan materialnya yang tinggi tidak membuat mereka menjadi masyarakat yang lebih bahagia. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tim Jackson, *Prosperity Without Growth: Economic for a Finite Planet* (London & Washington, DC: Earthscan, 2011), hal 15-16. Catatan: kontroversi mengenai korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran tidak menjadi perhatian utama tulisan ini.

Menurut para ahli ekonomi seperti Joseph Stiglitz, David C. Korten dan Richard Heinberg, ideologi pertumbuhan ekonomi yang dipaksakan pengusung ekonomi neoliberal merupakan sesuatu yang tak mungkin (*nonsense*) karena berhadapan dengan keterbatasan planet bumi.<sup>38</sup> Ideologi pertumbuhan rezim ekonomi neoliberal merupakan sebuah ilusi karena bertentangan dengan kenyataan bahwa kekayaan planet bumi terbatas dan sedang menuju proses untuk habis. Tambahan lagi, sebahagian besar kekayaan alam planet bumi yang sudah mulai habis persediaannya itu hanya dapat ditemukan di wilayah pemukiman masyarakat penduduk asli dan agraris di belahan bumi Selatan dan tidak bisa dieksploitasi dengan gampang dengan mengorbankan penduduknya. Bila dieksploitasi secara paksa, mereka akan siap untuk menentangnya karena mereka sudah menyadari dampak negatifnya yang masif.

Tentang pertumbuhan ekonomi yang diamanatkan rezim ekonomi neoliberal ini sebagai sebuah ilusi dan karena itu cepat atau lambat akan berakhir juga, Richard Heinberg mengatakan bahwa pemicu utamanya nanti adalah karena kehabisan minyak bumi (Heinberg 2011: 15). Produksi dan penggunaan minyak bumi sudah melewati apa yang disebut “peak oil” atau puncak tengah tertinggi dari volume minyak yang terkandung dalam perut bumi dan 7 miliar masyarakat manusia sedang menggunakan setengah yang masih sisa ini menuju penghabisannya. Menurut hasil penelitian tahun 2000 yang dilaporkan Mikhael Klare, minyak yang masih tersisa dalam perut bumi adalah 1,033 miliar barrel dan jumlah ini masih bisa memenuhi kebutuhan dunia hingga tahun 2040 jika penggunaannya tetap hanya 73 juta barrel/hari seperti pada tahun 2000. Tetapi kalau penggunaan minyak meningkat 2% per tahun maka minyak bumi yang masih sisa ini akan habis terpakai sekitar tahun 2025 sampai 2030 (Klare 2001: 19). Minyak bumi, yang proses pembentukannya dari fosil membutuhkan waktu antara 50 sampai 300 juta tahun, dikonsumsi habis oleh umat manusia hanya dalam tempo 125 tahun.<sup>39</sup>

Selama ini AS termasuk negara yang paling banyak mengonsumsi minyak bumi yaitu sekitar 25%.<sup>40</sup> Padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 300 juta jiwa

38 Karena keterbatasan planet bumi untuk menyiapkan bahan mentah bagi kebutuhan hidup manusia, David C. Korten dalam bukunya *The Post-Corporate World: Life after Capitalism* (San Fransisco: Berret-Koehler, 1999) sudah berbicara tentang berakhirnya kapitalisme dan hidup sesudah kapitalisme atau Joseph Stiglitz dalam bukunya *Free Fall America, Free Markets and the Sinking of the World Economy* (New York and London: W.W. Norton & Company, 2010) telah berbicara tentang tenggelamnya ekonomi dunia atau Richard Heinberg dalam bukunya *The End of Growth: Adapting to Our New Economic Reality* (Canada: New Society Publishers, 2011) telah berbicara tentang berakhirnya pertumbuhan ekonomi dunia dan masyarakat dihimbau untuk mulai menyesuaikan gaya hidup dengan realitas ekonomi yang baru atau Joel Balkan dalam bukunya *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power* (London: Constable & Robinson Ltd, 2004) telah melihat pengejaran keuntungan (*profit*) dan kuasa dalam ekonomi yang dimesini korporasi sebagai sesuatu yang patologis (sesuatu yang menyedihkan).

39 “Peak Oil: Info & Strategies”, in <http://www.oildecline.com/> (diakses pada 4 Mei 2012).

40 “Energy Statistics: Oil Consumption most recently by Country”, <http://www.nationmas->

dari 7 miliar jiwa penduduk dunia saat ini. Dalam peta global pembangunan dunia saat ini, Cina juga sedang berusaha keras untuk mengejar pertumbuhan ekonomi seperti negara Barat (Eropa & Amerika) dan ingin mencapai standar hidup seperti negara Barat. Hal ini tentu tak ada salahnya. Ini hak setiap bangsa. Tapi persoalannya, kalau Cina, dan tentu juga negara berkembang lainnya, mau maju dan ingin berstandar hidup seperti bangsa Barat, maka Cina dan negara berkembang lainnya juga akan berlomba habis-habisan untuk mengeruk kekayaan alam (minyak, tambang mineral) yang jumlahnya terbatas. Menurut laporan Mikhael Klare, saat ini sekitar 775 orang dari setiap 1000 penduduk Amerika Serikat memiliki mobil pribadi, di Jepang dan Kanada, sekitar 600 dari setiap 1000 orang (Klare 2001: 37). Sebuah angka yang tinggi sekali. Itu berarti dari sekitar 300 juta penduduk USA x 775 per 1000, maka di Amerika Serikat saat ini ada sekitar 236.500.000 mobil pribadi dan hanya 65.500.000 orang yang kemungkinan terdiri atas anak-anak di bawah umur 17 tahun saja yang belum memiliki mobil pribadi. Lalu Klare ingatkan bahwa kalau cukup  $\frac{1}{2}$  dari 1 miliar 344 juta penduduk Cina dan  $\frac{1}{2}$  dari sekitar 1 miliar 220 penduduk India berstandar hidup seperti Amerika atau Jepang, katakan punya mobil pribadi, maka kita harus membutuhkan kekayaan alam dari  $5 \frac{1}{2}$  planet baru. Itu baru mobil; belum kebutuhan yang lain. Maka, minyak di Laut Timor dan di Timur Tengah tidak cukup. Mangan di bawah kebun para petani desa di Timor, Flores dan Sumba, Kalimantan, Papua Barat, Afrika dan Amerika Latin, sekalipun dibongkar semua sampai habis dengan hancurkan sawah dan ladang mereka, tetap tidak akan cukup. Malah bisa berakhir bukan hanya dengan kemelaratan tapi kepunahan masyarakat yang selama ini sudah marginal. Dengan demikian, ideologi pertumbuhan ekonomi yang diusung dan dipaksakan rezim kapitalisme neoliberal saat ini merupakan sebuah ilusi. Ia merupakan sebuah kesesatan dan karena itu harus ditolak.

Setelah minyak habis, sulit dibayangkan gaya hidup masyarakat modern dan ekonominya yang berbasis pada industri akan masih bisa berjalan. Energi minyak bumi tetap tak tergantikan efisiensinya oleh energi alternatif lainnya seperti biofuel, matahari, angin, batubara, arus laut, dan *tar sand*.<sup>41</sup> Dan kehabisan minyak bumi berarti kemacetan atau berakhirnya pembangunan, kata sejumlah ahli. Dengan latar belakang ini, David C. Korten, Tim Jackson, dan Richard Heinberg, tampak jelas dari judul-judul buku mereka, sudah mulai mempersiapkan masyarakat dunia bagaimana seharusnya kehidupan manusia ditata dan diteruskan sesudah ekonomi kapitalis yang eksploitatif dan konsumtif berakhir karena kehabisan minyak bumi dan kekayaan alam dasar lainnya.

---

ter.com/graph/ene\_oil\_con-energy-oil-consumption (diakses pada 4 Mei 2012).

41 *Tar sand* adalah sejenis batu pasir di mana hidrokarbon telah terjebak; ketika senyawa ringan menguap maka ia akan meninggalkan residu aspal di pori-pori batuan. Tapi proses eksploitasinya mahal (Lih. "Tar Sand", <http://www.thefreedictionary.com/tar+sand> (diakses pada 4 Mei 2012)). Menurut para ahli, energi alternatif lain sulit disimpan dalam baterai dalam jumlah besar untuk 3 hal pokok: kapal laut, pesawat terbang, dan kereta api.

## G. RESEP REORIENTASI PEMBANGUNAN INDONESIA

Dengan melihat kondisi planet bumi yang demikian, bangsa-bangsa Asia, selain Jepang dan *the four tigers* (Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan), Afrika dan Amerika Latin tampaknya tidak akan bisa tumbuh dan berkembang secara fisik seperti yang sudah dicapai bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Utara. Sekalipun seluruh tambang mangan, besi dan perak yang masih sisa di daerah-daerah di Flores, Sumba, Timor dan daerah-daerah lain di Indonesia, di Asia pada umumnya, di Afrika dan Amerika Latin dieksploitasi sampai habis dengan menghancurkan sawah-ladang para petani dan hutan lindung, dan hasilnya diekspor untuk membangun Cina, Jepang, Korsel, Amerika atau Eropa, desa-desa di Flores, daerah-daerah terpencil lainnya di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya tidak akan berubah menjadi kota metropolitan seperti Paris, London, Frankfurt, Milan, New York atau Hong Kong, Tokyo dan Makau, yang penuh dengan gedung-gedung tinggi dan stasiun kereta api cepat antarkota. Ini tidak akan terjadi. Sebaliknya, orang desa di seluruh Indonesia justru akan menjadi lebih miskin dan hidup lebih sulit. Mereka tetap akan pergi dan pulang dari kebun berjalan kaki sambil mengusung kayu api di kepala. Pada musim paceklik, sebagian dari mereka akan tetap makan biji asam seperti telah terjadi di beberapa tempat di NTT atau umbi beracun di hutan. Tapi itupun kalau perusahaan asing tidak menggusur semua pohon asam dan hutan-hutan yang masih sisa.

Propaganda kemakmuran melalui pertumbuhan ekonomi oleh rezim kapitalisme neoliberal yang dieksekusi PETRANS merupakan sebuah ilusi atau mitos. Kemakmuran sebagai akibat dari *trickle-down effect* dari sistem ekonomi neoliberal yang dieksekusi PETRANS merupakan sebuah akal-akalan. Selama sekitar 30 tahun di bawah kekuasaan ekonomi neoliberal, negara-negara berkembang yang dibebani utang termasuk Indonesia semakin miskin, sementara negara-negara industri pengusung sistem ekonomi ini semakin kaya. Daerah-daerah terpencil Indonesia tidak akan pernah bisa maju secara fisik seperti Eropa dan Amerika Utara atau Jepang. Alasannya jelas. Selain karena usaha pencapaian kemajuan pembangunan fisik dengan standar yang telah diraih bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Utara membutuhkan waktu yang sangat lama, sumber-sumber dasar kekayaan planet bumi secara keseluruhan sudah mulai habis. Minyak bumi sebagai energi utama pembangunan manusia pada abad 20 dan awal abad 21 ini akan habis dalam waktu tak lama lagi. Karena itu, tindakan Pemda NTT menerbitkan sekitar 413 IUP untuk menambang pelbagai jenis mineral di pulau kecil di Provinsi NTT dan di daerah-daerah lain di Indonesia, dengan menghancurkan sawah, ladang dan kebun para petani desa serta hutan lindung di wilayah mereka merupakan sebuah pilihan arah pembangunan yang sangat tidak tepat dan karena itu harus dipertimbangkan kembali.

Bersama dengan pemerintah negara-negara berkembang lainnya, pemerintah Indonesia mesti sadar bahwa model ekonomi dan pembangunan manusia

yang dipaksakan oleh rezim kapitalisme neoliberal, yang dipimpin oleh negara-negara industri G7/8 melalui IMF, Bank Dunia dan WTO serta dieksekusi oleh PETRANS bukan merupakan model pembangunan yang tepat. Pembangunan hidup dan peradaban manusia tidak bisa ditempuh dengan cara mengeksploitasi alam secara berlebihan (pembangunan yang eksploitatif) dan dengan menggunakan sumber-sumber alam secara berlebihan (gaya hidup konsumtif). Tata ekonomi dunia baru (*New World Economy Order*) yang dirancang di Bretton Woods pada tahun 1944 mesti direvisi kembali secara total. Pertumbuhan ekonomi yang dibingkai pasar dan perdagangan bebas yang tak terkontrol, yang mendorong eksploitasi alam secara berlebihan dan mendorong budaya konsumtif mesti ditinggalkan.

Semua bangsa manusia mesti belajar untuk membangun hidup dan peradabannya selaras dengan kemampuan alam untuk menopang semua unsur kehidupan. Negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mesti belajar kembali apa artinya pembangunan manusia (*human progress*) dan bagaimana mereka harus menggapainya secara berkelanjutan (*sustainable*). Tim Jackson ingatkan bahwa kemakmuran sejumlah kecil orang selama ini sesungguhnya diraih dengan menghancurkan alam (Jackson:15), dan negara-negara berkembang lainnya seharusnya tidak mengikuti jalan keliru yang sama. Tidak semua peradaban yang dicapai bangsa Barat selama ini, misalnya kemajuan fisik dalam bentuk gedung-gedung dan apartemen yang tinggi, jalan raya besar dan rel-rel kereta api yang tembus gunung dan bukit (*tunnel*), budaya hiburan yang kolosal seperti balap mobil, peragaan busana (*beauty show*), dapat menjadi model untuk dikejar.

Menurut UUD 45 dan Falsafah Pancasila, pembangunan ekonomi dan peradaban Indonesia bersifat holistik – menyeluruh – meliputi badan dan jiwa, rohani dan jasmani. Ia tidak hanya diukur oleh pembangunan fisik tapi juga pembangunan spiritual. Karena manusia pada dasarnya merupakan badan yang menjiwa (*inspired body*) dan sekaligus jiwa yang membadan (*embodied spirit*). Selama manusia hidup, jiwa dan badan begitu satu dan tidak bisa dipisahkan. Dan karena itu pembangunan jasmani dan rohani, fisik dan spiritual untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kodratnya demikian mesti berjalan bersamaan dan secara seimbang. Pembangunan rohani yang umumnya dijalankan oleh lembaga-lembaga agama, entah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha atau Aliran Kepercayaan mesti dihargai dan didukung oleh pemerintah/negara. Kalau kita yakin bahwa pembangunan spiritual sangat vital bagi kepentingan bangsa, pembangunan rohani yang dijalankan oleh lembaga-lembaga agama seharusnya dianggarkan juga di dalam APBN/APBD. Pembangunan Indonesia yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur (Sila Kelima) bersumber pada pengakuan akan Tuhan (Sila Pertama) sebagai asal dan tujuan dari segala sesuatu termasuk bumi dan

bangsa Indonesia dan didasarkan pada visi kemanusiaan yang beradab (Sila Kedua). Untuk mencapai tujuan ini bangsa Indonesia mesti bersatu sebagai satu bangsa yang bersaudara (Sila Ketiga) apa pun suku, agama, budaya, ras, pulau atau daerahnya dan hidup penuh kasih dalam wadah demokrasi (Sila Keempat) di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, didelegasikan kepada pemerintah untuk dijalankan atas nama rakyat dan bertujuan akhir untuk kepentingan rakyat.

Hingga 5 Februari 2012 total utang luar negeri Indonesia adalah Rp 1.937 triliun atau Rp 1.937.000.000.000.000.<sup>42</sup> Kalau utang ini dibagi kepada 238.000.000 jiwa penduduk Indonesia, maka setiap warga Indonesia, termasuk yang baru lahir, dibebani utang luar negeri sebesar Rp 8.138.655. Utang ini pasti termasuk utang yang dipinjam dari rezim ekonomi neoliberal melalui IMF dan Bank Dunia pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Bersama dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia seharusnya berani menuntut penghapusan utang ini karena pinjaman tahun-tahun ini dimotivasi politik terselubung dari negara-negara kreditor atau pemegang saham terbesar pada kedua lembaga keuangan di Washington, DC. Lebih dari itu, pinjaman ini tidak banyak dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia karena telah disalahgunakan rezim Orde Baru. Ini jelas merupakan *odious debt*. Ini utang tidak sah, tidak *fair*, dan tidak bermoral. Bangsa Indonesia kini berhak menuntut untuk menghapusnya. Hanya kalau Indonesia menolak membayar *odious debts*, Indonesia akan bebas juga dari resep SAPs atau apa pun namanya yang baru seperti PRSPs (*Poverty Reduction Strategy Papers*) yang dipaksakan oleh rezim ekonomi neoliberal.

Kembalikan dan pertahankan kedaulatan ekonomi seturut UUD 45 Ps. 33. Aset-aset vital yang menguasai hidup rakyat banyak seperti perusahaan air minum, listrik, pelayanan pos, jasa kereta api, penggalian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam, pendidikan dan kesehatan tidak dapat dibenarkan untuk dikelola oleh perusahaan swasta, baik nasional maupun internasional, melainkan mesti dikuasai dan dikelola oleh negara (BUMN) atas nama rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Alasan klasik bahwa BUMN sering tidak efisien dan selalu merugi tidak bisa dijadikan alasan untuk menjual aset-aset vital negara kepada perusahaan swasta, tetapi dengan memperbaiki sistem, mekanisme serta mental petugas yang menyelenggarakannya. Demi kedaulatan ekonomi, Indonesia bersama bangsa-bangsa lain mesti berjuang memberantas *tax havens*, kontrol aliran modal dari dalam dan keluar negeri dan tetap berantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Untuk masa depan, Indonesia yang sangat subur karena pupuk alam dari barisan gunung api dari Sabang sampai Merauke bisa membangun atas

42 "Gawat! Tahun 2012 Utang Indonesia di Luar Negeri Capai Rp 1.937 Triliun" dalam LensaIndonesia online, <http://www.lensaIndonesia.com/2012/02/05/gawat-tahun-2012-utang-indonesia-di-luar-negeri-capai-rp-1-937-triliun.html> (diakses pada 4 Mei 2012).

dasar kekuatan sendiri dengan berbasis pada pertanian, peternakan, dan pengelolaan maritim. Bila uang rakyat yang dikumpul dari pelbagai macam pajak keringat 238.000.000 jiwa penduduk Indonesia (PPH, PPn, PPnBM, PBB, BPHTB, Meterai, dan lain-lain) dikelola dengan baik, tidak dikorupsi para petugas pajak pada waktu proses pengumpulannya dari tangan rakyat dan tidak dikorupsi lagi oleh pemerintah pada waktu pengalokasiannya via APBN/APBD, Indonesia sebenarnya bisa hidup dan maju hanya dari dan oleh sumber pajak. Indonesia seharusnya tidak perlu meminjam pada lembaga keuangan luar negeri termasuk institusi Bretton Woods di Washington DC yang didominasi oleh G7 sebagai pengusung sistem ekonomi neoliberal yang opresif, eksploitatif, dan konsumeristis. Kalaupun Indonesia sekarang dan di masa datang terpaksa harus meminjam pada lembaga keuangan luar negeri, maka pinjaman itu hanya bisa dibuat setelah mendapat persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Ia terlebih dahulu harus terbuka untuk didiskusikan di dalam sidang DPR dan media massa. Alasannya sangat mendasar. Setiap pinjaman luar negeri oleh pemerintah dibuat atas nama rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan akan dibayar kembali oleh pajak rakyat.

## F. CATATAN AKHIR

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia termasuk di Flores, Sumba, dan Timor tidak dapat dimengerti secara terpisah dari persoalan ekonomi global. Praktik industri pertambangan yang bermasalah di kampung-kampung petani miskin di Flores, Timor, Sumba dan juga di banyak daerah lain di Indonesia yang dilakukan PETRANS dengan menghancurkan kebun, sawah dan ladang mereka, dengan mengeringkan sumber-sumber air dan hutan lindung, berhubungan erat dengan sistem ekonomi neoliberal yang dirancang dan dipaksakan oleh negara-negara industri maju, dan diamanatkan kepada lembaga keuangan internasional serta dilaksanakan oleh PETRANS. Ekonomi neoliberal dirancang untuk menguntungkan negara-negara industri dengan menguasai sumber-sumber daya alam negara-negara miskin yang sedang berkembang. Hasilnya, negara industri semakin kaya dan negara miskin yang sedang berkembang semakin miskin. Seperti kata ahli-ahli ekonomi Eropa dan Amerika yang masih mempunyai hati nurati, sistem ekonomi neoliberal merupakan sebuah bentuk penjajahan baru melalui jalur ekonomi. Bentuknya sangat halus. Kemakmuran yang diwartakannya melalui pertumbuhan ekonomi merupakan ilusi karena bertentangan dengan fakta keterbatasan alam. Di zaman di mana kekayaan alam sudah semakin sulit diperoleh, seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia harus bersatu dalam mempertahankan dan mengamankan kekayaan alam Indonesia yang masih tersisa, menggarap dan mengelolanya sendiri secara arif dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat seperti diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 dan Falsafah Pancasila.

(Alex Jebadu SVD)

## Referensi:

- Ana, Julio de Santa, "How the Rich Nations Came to be Rich" in Leonardo Boff and Virgil Elizondo (eds.), *Option for the Poor: Challenge to the Rich Countries*. Edinburgh: T. & T. Clark Ltd, 1986.
- Balkan, Joel. *The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*. London: Constable & Robinson Ltd, 2004.
- Butler, Rhett A., "Borneo" in <http://www.mongabay.com/borneo.html> (diakses pada 14 Maret 2012).
- Chomsky, Noam, "Neoliberalism and the Global Order" [http://www.thirdworldtraveler.com/Chomsky/NeoliberalismPOP\\_Chom.html](http://www.thirdworldtraveler.com/Chomsky/NeoliberalismPOP_Chom.html) (diakses pada 15/12/2011).
- Chuck, Collin and Mary, Wright. *The Moral Measure of Economy*. New York: Orbis Books, 2007, hal. 130.
- Dori, Jukandi, "Dampak Penambangan Timah bagi Masyarakat Bangka Belitung" in [http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DAMPAK%20PENAMBANGAN%20TIMAH%20BAGI%20MASYARAKAT%20BANGKA%20BELITUNG&&nomorurut\\_artikel=363](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DAMPAK%20PENAMBANGAN%20TIMAH%20BAGI%20MASYARAKAT%20BANGKA%20BELITUNG&&nomorurut_artikel=363) (diakses 4 Maret 2012).
- Douglass C., North. "Corporation," in *The New Encyclopedia Americana*, Vol. 8, Danbury, Connecticut: Americana Corporation, 1979, hal. 12.
- Drimmelen, Rob Van. *Faith in a Global Economy: A Primer for Christians*. Geneva: World Council of Churches' Publication, 1998.
- Gedicks, Al, "West Papua: The Freeport/Rio Tinto Campaign," in Moody Roger, *The Risks We Run: Mining, Communities and Political Risk Insurance*. London: International Books, 2005.
- Hallman, David G., "Ethics & Sustainable Development", dalam Hallman, David G. (ed.), *Ecotheology: Voices from South and North*. New York: Orbis Books, 1994.
- Heinberg, Richard. *The End of Growth: Adapting to Our New Economic Reality*. Canada: New Society Publishers, 2011.
- <http://www.censin.com/dinas-pertambangan-ntt-terbitkan-240-iup-mangan/>, "Dinas Pertambangan NTT Terbitkan 240 IUP Mangan" (diakses pada 28 Desember 2011).
- <http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=44450>, "Evaluasi 413 Izin Pertambangan di NTT", diakses pada 4/01/ 2011.
- <http://africanhistory.about.com/library/timelines/blIndependenceTime.htm>, "A Chronological List of Independence Dates for Africa", diakses pada 27/04/2012.
- <http://portal.endekab.go.id/component/content/article/40-berita/379-anggaran-belanja-lansung-tahun-2012-mengalami-penurunan.html> (diakses pada 28 April 2012).
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Structural\\_adjustment](http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_adjustment), "Structural adjustment Policies" (diakses pada 22/11/2011).

- <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6219274.stm>, “UK firms ‘exploiting Bangladesh” (diakses pada 28 April 2012).
- <http://www.oildecline.com/>, “Peak Oil: Info & Strategies”, (diakses pada 4 Mei 2012).
- [http://www.nationmaster.com/graph/ene\\_oil\\_con-energy-oil-consumption](http://www.nationmaster.com/graph/ene_oil_con-energy-oil-consumption), “Energy Statistics: Oil Consumption most recently by Country”.
- <http://www.lensaindonesia.com/2012/02/05/gawat-tahun-2012-utang-indonesia-di-luar-negeri-capai-rp-1-937-triliun.html> (diakses pada 4 Mei 2012).
- <http://www.thefreedictionary.com/gross+national+product> (diakses pada 3 Mei 2012).
- Jackson, Tim. *Prosperity Without Growth: Economic for a Finite Planet*. London & Washington, DC: Earthscan, 2011.
- Jebadu, Alex, dkk (eds.). *Pertambangan di Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk?*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Klare, Mikhael. *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict*. New York: Owl Book, 2001.
- Korten, David C. *When Corporations Rule the World*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 1996.
- Korten, David C. *The Post-Corporate World: Life after Capitalism*. San Fransisco: Berret-Koehler, 1999.
- Kristiansen, Stein, “Recovering the costs of power: Corruption in local political and civil service positions in Indonesia” (Workshop di UI Jakarta 16/07/2008, *manuscript*).
- Madeley, John. *Big Business Poor Peoples: How Transnational Corporations Damage the World’s Poor*. London: Zed Books, 2008.
- Muhamad, Khalid, “Korporatokrasi dan Peraturan Exploitasi Alam di Indonesia” (manuskrip yg tak terbit).
- Murphy, Richard, “Fiscal Paradise or Tax on Development?” <http://www.richard.murphy.dial.pipex.com/Fiscalparadise.pdf> (diakses pada 2 Januari 2012, hal. 11-12).
- Peet, Richard. *Unholy Trinity: IMF, World Bank and WTO*. London and New York: Zed Books, 2010.
- Pilger, John, “Konspirasi di Indonesia”, in <http://www.youtube.com/watch?v=X7Fbmy3V0hs> (diakses pada 28 Oktober 2011).
- Populorum Progressio* Artikel 58, 1967.
- Rhett A., Butler, “Borneo, ” in <http://www.mongabay.com/borneo.html> (diakes pada 14 Maret 2012).
- Roger, Moody. *The Risks We Run: Mining, Communities and Political Risk Insurance*. London: International Books, 2005.

- Sewell, Ward Dan, "Transnational Corporations," dalam <http://www.halexandria.org/dward318.htm> (diakses pada 4 November 2011).
- Stiglitz, Joseph. *Free Fall America, Free Markets and the Sinking of the World Economy*. New York and London: W.W. Norton & Company, 2010.
- Stiglitz, Joseph. *Globalization and Its Discontents*. London: Penguin Books, 2002.
- Tossain, Eric & Millet, Damien. *Debt, the IMR, the World Bank: Sixty Questions Sixty Answers*. New York: Monthly Review Press, 2010.
- Tukan, Simon Suban, "Industri Pertambangan: Mesin Penghancur yang Masif di Manggarai" in Jebadu, Alex et.al., (eds.). *Pertambangan di Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk?*. Maumere, Indonesia: Penerbit Ledalero, 2009.
- Shah, Anup, "Structural Adjustment—a Major Cause of Poverty", <http://www.globalissues.org/article/3/structural-adjustment-a-major-cause-of-poverty> (diakses pada 21 September 2011).